









LAMPIRAN

Lampiran 1. Screenshot Bimbingan Skripsi

NIM	2018041037	Nama Mahasiswa	ADITYA ARIANTO DENIS
Program Studi	Ilmu Komunikasi	SKS Lulus	147 SKS
Tgl. Mulai	13 April 2022	Judul Tugas Akhir	Pembangkaian Berita Isu Kebijakan Lingkungan Dalam Undang Undang Cipta Kerja (Komparasi Framing Isu Kebijakan Lingkungan dan Dampaknya pada Lingkungan antara Mongabay.co.id dan Antaranews.com)

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Topik	Disetujui	Aksi
1	10 Februari 2022	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Bimbingan Skripsi	✓	
2	22 Februari 2022	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Bimbingan Skripsi Bab II	✓	
3	11 Maret 2022	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Revisi Bab 1 - 3	✓	
4	15 Maret 2022	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Administrasi sidang proposal	✓	
5	7 Mei 2022	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Bimbingan pengerjaan bab 4 skripsi	✓	
6	16 Juni 2022	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Revisi penulisan dan pengerjaan bab 4	✓	
7	29 Mei 2022	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Bimbingan skripsi bab 1 hingga bab 5	✓	
8	2 Juli 2022	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Revisi skripsi bab 4 dan bab 5	✓	

Lampiran 2. Skema Analisis Framing Zhondang Pan & Gerald M. Kosicki

Struktur	Perangkat Framing	Unit Yang Diamati
Sintaksis	1. Skema berita	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, penutup
Skrip	1. Kelengkapan	berita 5 W + 1 H
Tematik	2. Detail 3. Koherensi 4. Bentuk kalimat 5. Kata ganti	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat
Retoris	1. Leksikon 2. Grafis 3. Metafora	Kata, idiom, gambar, foto, grafik

Sumber: Eriyanto, 2011

Lampiran 3. Tabel Hasil Analisis Artikel Berita

Tabel 4.1. Hasil Analisis Artikel Berita 1

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	“ICEL minta pemerintah pertimbangan ulang penghapusan izin lingkungan”
	Lead	Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) Raynaldo G. Sembiring Mengharapkan pemerintah kembali mempertimbangkan ulang penghilangan izin lingkungan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
	Latar Informasi	Beberapa pemaparan tanggapan dari Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) Raynaldo G. Sembiring yang berharap mempertimbangkan ulang penghilangan izin lingkungan dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja karena dianggap membahayakan lingkungan hidup.
	Kutipan Sumber	Raynaldo G. Sembiring (Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) 1. "Izin lingkungan itu memiliki fungsi pencegahan dan dalam UU Lingkungan itu sudah disampaikan itu merupakan salah satu dari beberapa instrumen yang berfungsi untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan," 2. "Akan ada kewenangan yang hilang sebenarnya dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk sebenarnya mengendalikan dampak pencemaran dan kerusakan yang sebenarnya itu

	bisa dikendalikan kalau masih ada izin lingkungan,"
Pernyataan Opini	Raynaldo, memberikan pernyataan bahwa penghapusan izin lingkungan hidup yang ada dalam RUU Cipta Kerja akan mengurangi alat untuk mengendalikan dan mencegah dampak yang akan terjadi untuk lingkungan hidup.
Penutup	Artikel ini ditutup dengan pernyataan izin usaha, menurut Raynaldo, tidak akan memuat kewajiban-kewajiban di bidang lingkungan bagi pelaku usaha yang sebenarnya hasil dari amdal.

Struktur Skrip

What	Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) Raynaldo G. Sembiring berharap pemerintah tidak melakukan penghilangan izin lingkungan pada RUU Cipta Kerja.
Where	Jakarta, Indonesia
When	17 Februari 2020
Who	Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) Raynaldo G. Sembiring
Why	Raynaldo G. Sembiring berharap kepada pemerintah agar tidak menghapus izin mengenai lingkungan dalam RUU Cipta Kerja karena hal tersebut nantinya akan berdampak buruk pada lingkungan.
How	Raynaldo G. Sembiring memberikan pernyataan bahwa penghapusan izin lingkungan hidup akan mengurangi alat untuk mengendalikan dan mencegah dampak yang akan terjadi untuk lingkungan hidup.

Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, hubungan antar kalimat	Dalam pemberitaan ini berisi mengenai harapan dan juga pesan dari Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) Raynaldo G. Sembiring kepada pemerintah agar tidak menghapuskan izin mengenai lingkungan dalam RUU Cipta Kerja, karena dia menganggap bahwa penghapusan itu akan menyebabkan dampak yang kurang baik untuk lingkungan hidup kedepannya.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Penggunaan foto serta Ilustrasi - Sejumlah pengunjung rasa yang sedang berdemo mengenai aksi stop tambang galian C di Mojokerto masih belum sesuai dengan isi pemberitaan pada artikel ini.

Tabel 4.2. Hasil Analisis Artikel Berita 2

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	“Stafsus Presiden: RUU Omnibus Law Cipta Kerja tetap atur amdal”
	Lead	Penjelasan mengenai isu analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) di RUU Cipta Kerja yang tetap ada oleh Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono.
	Latar Informasi	Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono memberikan penjelasan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) di RUU Cipta Kerja tetap ada dan bukan menghilangkan sama sekali, hanya saja Amdal dalam RUU Cipta Kerja dibuat lebih selektif penerapannya karena dilihat dari risiko, <i>risk based</i> .

Kutipan Sumber

Dini Purwono (Staf Khusus Presiden Bidang Hukum,)

1."Masalah lingkungan di RUU Cipta Kerja tetap ada amdal, bukan menghilangkan sama sekali karena amdal tetap perlu tapi akan lebih selektif penerapannya karena dilihat dari risiko, risk based,"

2. "Kita lihat di praktik selama ini, kadang-kadang untuk industri yang memang berisiko tinggi, terkorelasi dengan bahan baku yang berbahaya amdal harus tetap tapi amdal juga memberatkan pengusaha untuk industri yang sektornya tidak berbahaya tapi diwajibkan membuat amdal yang harganya tidak murah, bahkan mencapai ratusan juta, tapi sesudah itu dokumen amdal disimpan dan tidak ada pemantauan lagi,"

3. "Jadi lebih penting monitoring evaluasi dari waktu ke waktu mengenai efek industri tersebut ke lingkungan. Dari awal disampaikan apa yang tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh lalu dilanjutkan dengan monitoring pengecekan secara berkala dan ada sanksi untuk yang melanggar,"

4. "Aturan yang lalu tidak ada pengawasan di lapangan jadi diputuskan untuk industri-industri berisiko tinggi menggunakan bahan baku berbahaya tetap harus ada dokumen amdal, tapi kalau yang bahannya tidak berbahaya tinggal diberikan panduan apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan,"

Pernyataan Opini

Dini Purwono, memberikan pernyataan bahwa izin lingkungan hidup yang ada dalam RUU Cipta Kerja tetap ada, dan

		juga dalam RUU Cipta Kerja memberikan kajian yang lebih mudah bagi para pelaku usaha kecil untuk melakukan pembangunan usaha.
	Penutup	Artikel ini ditutup dengan informasi mengenai bahaya dalam RUU Cipta Kerja yang dapat melemahkan pengaturan lingkungan hidup, perubahan pasal-pasal memicu perbedaan interpretasi karena tidak ada penjelasan isi pasal.
Struktur Skrip	What	Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono. Memberikan penjelasan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) di RUU Cipta Kerja tetaplah ada.
	Where	Jakarta, Indonesia
	When	21 Februari 2020
	Who	Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono.
	Why	Dini Purwono. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, memberikan penjelasan mengenai bahwa RUU Cipta Kerja masih memiliki izin usaha di tengah kesimpangsiuran informasi mengenai dampak buruk dari RUU Cipta Kerja terhadap lingkungan.
	How	Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono. memberikan pernyataan bahwa analisis dampak dan izin lingkungan hidup akan yang ada pada RUU Cipta Kerja tidak dihapuskan dan tetap ada.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, hubungan antar kalimat	Dalam pemberitaan ini berisi mengenai tanggapan dan informasi yang diberikan oleh Dini Purwono, selaku Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, yang

		menjelaskan bahwa RUU Cipta Kerja tidak menghapuskan izin analisis dampak lingkungan di dalamnya, dalam paragraf kedua dalam pemberitaan ini juga menangkal adanya isu-isu di masyarakat bahwa RUU Cipta Kerja nantinya menghilangkan penataan ruang, pertambangan mineral dan batubara, perkebunan, kehutanan, kelautan, pengelolaan area pesisir dan pulau kecil, ketenagalistrikan serta keanekaragaman hayati.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Penggunaan foto Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono yang sedang berbicara sangat mendukung pemberitaan ini.

Tabel 4.3. Hasil Analisis Artikel Berita 3

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	“RUU Cipta Kerja perlu keseimbangan lingkungan-pembangunan ekonomi”
	Lead	Anggota Komisi IV DPR, Hamid Noor Yasin memberikan pernyataan bahwa RUU Cipta Kerja perlu penguatan dalam aspek perlindungan lingkungan agar ada keseimbangan antara sisi lingkungan dengan pembangunan perekonomian nasional di dalamnya.
	Latar Informasi	Beberapa pemaparan pernyataan dan harapan dari Anggota Komisi IV DPR, Hamid Noor Yasin. Mengenai Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang dinilai dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan juga sosial.
	Kutipan Sumber	Hamid Noor Yasin (Anggota Komisi IV DPR)

		<p>1 "Saya berharap UU Cipta Kerja mampu mendorong pembangunan yang dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan juga sosial,"</p> <p>2. Lingkungan hidup yang baik adalah jantung ekonomi masyarakat-rakyat banyak. Contohnya Ekosistem laut yang bagus akan menghasilkan ikan yang berlimpah. Begitupun hutan yang bagus akan menghasilkan madu yang banyak,"</p> <p>Bahlil Lahadalia Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)</p> <p>1. "RUU Cipta Kerja yang terdiri dari 11 klaster, 15 bab, 174 pasal, itu semua berorientasi pada izin usaha dan investasi. Maka Omnibus Law ini adalah pintu masuk untuk kita menciptakan lapangan pekerjaan,"</p> <p>2. "Bagaimana menyelesaikan masalah itu? Di UU, demokrasi ekonomi, ekonomi berkeadilan, investasi inklusif, itu angan-angan kalau aturan tidak ada perbaikan. Investasi Indonesia ke depan akan lebih baik apabila syaratnya segera selesaikan UU Omnibus Law,"</p>
	Pernyataan Opini	Hamid Noor Yasin memberikan pernyataan bahwa paradigma pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan perlu untuk menjadi semangat dan tujuan dalam UU Cipta Kerja nantinya.
	Penutup	Artikel ini ditutup dengan pernyataan dari Bahlil Lahadalia Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang optimis bahwa RUU Cipta Kerja akan meningkatkan daya saing investasi Indonesia.
	What	Hamid Noor Yasin Anggota Komisi IV DPR memberikan anggapan bahwa RUU

Struktur Skrip		Cipta Kerja perlu keseimbangan lingkungan-pembangunan ekonomi, agar terciptanya kesemnganan ekonomi dan juga lingkungan.
	Where	Jakarta, Indonesia
	When	6 Agustus 2020
	Who	Hamid Noor Yasin Anggota Komisi IV DPR, Bahlil Lahadalia Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
	Why	Hamid Noor Yasin dan Bahlil Lahadalia menyakinkan bahwa RUU Cipta Kerja perlu keseimbangan lingkungan dan ekonomi demi terciptanya lapangan kerja yang baik.
	How	Bahlil Lahadalia memberikan pernyataan bahwa investasi Indonesia ke depan akan lebih baik apabila syaratnya segera selesaikan UU Omnibus Law,"
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, hubungan antar kalimat	Dalam pemberitaan artikel ini berisi tentang tangaapan dari Hamid Noor Yasin dan Bahlil Lahadalia yang memberikan pemahaman bahwa RUU Cipta Kerja nantinya akan menjadi solusi untuk ekonomi dan juga keseimbangan lingkungan.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Penggunaan foto Anggota Komisi IV DPR, Hamid Noor Yasin yang sedang berbicara di depan mikrofon terlihat memberikan penjelasan isi dari pemberitaan ini. Penambahan kutipan besar dengan kata-kata “Lingkungan hidup yang baik adalah jantung ekonomi masyarakat-rakyat banyak” di awal pemberitaan juga mendukung sisi positif bagi RUU Cipta Kerja dalam artikel pemberitaan ini.

Tabel 4.4. Hasil Analisis Artikel Berita 4

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	“UU Cipta Kerja bisa batalkan izin usaha jika bermasalah di lingkungan”
	Lead	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebutkan bahwa Undang Undang Cipta Kerja dapat memperkuat penegakan hukum pada perizinan usaha. Hal tersebut dikarenakan Perizinan Berusaha bisa dibatalkan jika perusahaan bermasalah di isu lingkungan.
	Latar Informasi	Penjelasan Siti Nurbaya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Undang Undang Cipta Kerja yang berusaha mengintegrasikan Izin Lingkungan Hidup dan memberikan pemahaman informasi bahwa Undang Undang Cipta Kerja tidak akan melegakan izin lingkungan hidup.
	Kutipan Sumber	Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) 1. "Mengapa dia memperkuat penegakan hukum? Karena kalau di masa lalu ada masalah dengan lingkungan maka Izin Lingkungannya dicabut, tapi usahanya bisa saja tetap jalan. Sekarang berarti lebih kuat," 2. "Oleh karena itu, tidak benar apabila dikatakan undang-undang ini melemahkan perlindungan lingkungan. Itu tidak benar, karena dia bisa digugat perizinan perusahaannya dengan segala alasan dan sebagainya,"
	Pernyataan Opini	Siti Nurbaya memberikan pernyataan bahwa perlindungan lingkungan menjadi semakin kuat karena dalam Undang Undang karena, disebutkan Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila satu saja persyaratan yang diajukan dalam permohonan perizinan

		berusaha mengandung cacat hukum atau kekeliruan informasi di dalamnya.
	Penutup	Artikel ini ditutup dengan pernyataan oleh Siti Nurbaya yang mana perizinan pembangunan usaha dalam Undang Undang Cipta Kerja tetap ketat bagi para pelaku usaha.
Struktur Skrip		
	What	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memberikan tanggapan bahwa Undang Undang Cipta Kerja dapat memperkuat penegakan hukum pada perizinan usaha.
	Where	Jakarta, Indonesia
	When	7 Oktober 2020
	Who	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya
	Why	Siti Nurbaya bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan tanggapan mengenai Undang Undang Cipta Kerja yang justru memperkuat perizinan bagi para pelaku usaha dan bukan melemahkan perizinan usaha.
	How	Siti Nurbaya memberikan pernyataan bahwa nantinya perusahaan yang bermasalah dalam dokumen perizinan analisis dampak lingkungan (Amdal) dapat dibatalkan perizinannya.
Struktur Tematik		
	Paragraf, Proposisi kalimat, hubungan antar kalimat	Dalam pemberitaan artikel ini berisi tentang pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang memberikan pemahaman serta memberikan informasi bahwa Undang Undang Cipta Kerja dapat menjegal para pelaku usaha yang dokumen analisis dampak lingkungannya bermasalah.
Struktur Tematik		

Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Penggunaan foto Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang sedang melakukan pembicaraan secara virtual terlihat memberikan penjelasan isi dari pemberitaan ini. Pada pemberitaan ini ada penambahan kutipan besar dalam awal pemberitaan dengan kata-kata “UUCK mengintegrasikan kembali Izin Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha” menambah pemahaman bagi para pembaca bahwa Undang Undang Cipta Kerja masih memiliki izin analisis dampak lingkungan di dalamnya.
------------------	-----------------------------	--

Tabel 4.5. Hasil Analisis Artikel Berita 5

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	“Presiden Jokowi: Izin Amdal tetap ada di UU Cipta Kerja”
	Lead	Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa izin melalui analisis mengenai dampak lingkungan amdal tetap ada dalam Undang Undang Cipta Kerja.
	Latar Informasi	Penjelasan Presiden Joko Widodo mengenai Undang Undang Cipta Kerja yang tetap memiliki analisis dampak lingkungan di dalamnya, serta Presiden memberikan informasi industri besar yang harus melakukan kajian Amdal secara ketat. Sedangkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah lebih memberikan pendampingan serta pengawasan.
	Kutipan Sumber	Presiden Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) 1. "Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah dihapusnya Amdal. Itu juga tidak benar," 2. "Tapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan,"

	Pernyataan Opini	Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa izin melalui pemenuhan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) tetap akan diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
	Penutup	Artikel ini ditutup dengan penambahan informasi mengenai Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup.
Struktur Skrip		
	What	Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan mengenai perizinan usaha izin analisis dampak lingkungan yang masih tetap ada dalam Undang Undang Cipta Kerja.
	Where	Bogor, Indonesia
	When	9 Oktober 2020
	Who	Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
	Why	Joko Widodo menegaskan bahwa industri harus mengikuti ketentuan izin Amdal untuk mempertimbangkan dampak dari usaha.
	How	Presiden mengatakan industri besar harus melakukan kajian Amdal secara ketat. Sedangkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah lebih memberikan pendampingan dan pengawasan.
Struktur Tematik		
	Paragraf, Proposisi kalimat, hubungan antar kalimat	Dalam pemberitaan artikel ini berisi tentang pernyataan Presiden Joko Widodo yang memberikan informasi bahwa analisis dampak lingkungan tetap ada dalam Undang Undang Cipta Kerja dan tidak dihapuskan.
Struktur Retoris		
	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Penggunaan foto Ilustrasi - Foto aerial pembangunan proyek yang digunakan dalam pemberitaan ini masih kurang memberikan informasi mengenai isi pemberitaan.

Tabel 4.6. Hasil Analisis Artikel Berita 6

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	“Pemerintah pastikan izin Amdal tidak dihapus dalam UU Cipta Kerja”
	Lead	Pemerintah memastikan bahwa tidak ada penghapusan izin analisis dampak lingkungan (Amdal) pada Undang Undang Cipta Kerja di sektor lingkungan, perizinan lingkungan hanya dibuat sederhana agar aturannya tidak berbelit.
	Latar Informasi	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangan persnya di Jakarta memberikan pernyataan bahwa perubahan izin amdal dalam Undang Undang Cipta Kerja hanya terkait pemberian kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan.
	Kutipan Sumber	Susiwijono Moegiarso (Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) 1. "Amdal tidak dihapus, dan tetap ada, akan tetapi prosesnya dibuat menjadi lebih sederhana, sehingga waktu dan biaya yang dibutuhkan menjadi lebih efisien,"
	Pernyataan Opini	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebutkan bahwa Undang Undang Cipta Kerja mengatur prinsip dan konsep dasar Amdal tidak berubah, tetap sesuai ketentuan sebelumnya.
	Penutup	Artikel pemberitaan ini ditutup dengan pemaparan informasi mengenai pasal-pasal dalam Undang Undang Cipta Kerja bahwa keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau persetujuan

		Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Struktur Skrip	What	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi wijono Moegiarso yang memberikan kepastian bahwa izin Amdal tidak dihapus dalam Undang Undang Cipta Kerja
	Where	Jakarta, Indonesia
	When	9 Oktober 2020
	Who	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi wijono Moegiarso
	Why	Susi wijono Moegiarso menegaskan bahwa izin Amdal masih ada dan tidak akan dihapus dalam UU Cipta Kerja.
	How	Susi wijono Moegiarso mengatakan perubahan izin lingkungan di Undang Undang Cipta Kerja hanya terkait pemberian kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, hubungan antar kalimat	Dalam pemberitaan artikel ini berisi tentang informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi wijono Moegiarso terkait pemerintah memastikan bahwa tidak ada penghapusan izin analisis dampak lingkungan (Amdal) dalam Undang-Undang Cipta Kerja di sektor lingkungan hidup.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Penggunaan foto Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susi wijono Moegiarso yang sedang diwawancarai menjadi memperjelas isi pemberitaan pada artikel ini.

Tabel 4.7. Hasil Analisis Artikel Berita 7

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	“KLHK: UU Ciptaker tingkatkan pengelolaan perhutanan sosial”
	Lead	Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto menyatakan bahwa dengan diaturnya peraturan perhutanan sosial dalam Undang-undang Cipta Kerja akan meningkatkan pengelolaan perhutanan sosial.
	Latar Informasi	Pemaparan informasi oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto, Wakil Ketua DPR RI Komisi IV Dedi Mulyadi, Prof. San Afri Awang. Mengenai manfaat yang ada dalam peraturan perhutanan sosial dalam Undang Undang Cipta Kerja
	Kutipan Sumber	<p>Bambang Supriyanto (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)</p> <p>1 " Yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif juga bagi penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,"</p> <p>2. "Data capaian kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) sejak tahun 2016 hingga 2020 yang terus mengalami peningkatan. Jumlah KUPS hingga Juni tahun 2020 tercatat 7.311 KUPS dan terdapat lebih dari dua juta tenaga kerja sektor Perhutanan Sosial,"</p>

		<p>Prof. San Afri (Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada)</p> <p>1. "Perhutanan sosial menjadi strategis dan penting. Untuk itu perlu diperkuat dalam Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah terkait perhutanan sosial harus mampu mengatur dengan tata kelola yang baik semua bentuk perhutanan sosial yang digagas KLHK dan yang digagas masyarakat seperti yang dinyatakan dalam definisi perhutanan sosial"</p> <p>Dedi Mulyadi (Wakil Ketua DPR RI Komisi IV)</p> <p>1. "Saat ini, pemerintah memiliki otorisasi penuh dalam menentukan arah pengelolaan sumber daya kehutanan. Dedi berharap para pengelola di bidang kehutanan dapat meletakkan hutan tidak hanya sebagai sumber ekonomi publik tetapi juga sebagai sumber spiritualitas publik,"</p>
	Pernyataan Opini	<p>Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto pernyataan bahwa Undang Undang Cipta Kerja dinilai akan meningkatkan pengelolaan perhutanan sosial.</p>
	Penutup	<p>Artikel ini ditutup dengan informasi mengenai Undang Undang Cipta Kerja yang dinilai sangat berpihak kepada masyarakat dan mengedepankan restorative justice. Penegakan hukum bagi perusak lingkungan juga semakin jelas, tegas, dan lebih terukur.</p>

Struktur Skrip	What	Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto memberikan anggapan bahwa Undang Undang Cipta Kerja akan meningkatkan pengelolaan dan perhutanan sosial
	Where	Jakarta, Indonesia
	When	13 Oktober 2020
	Who	Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto, Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Prof. San Afri, Wakil Ketua DPR RI Komisi IV Dedi Mulyadi
	Why	Bambang Supriyanto menyakinkan bahwa Undang Undang Cipta Kerja akan meningkatkan pengelolaan perhutanan sosial.
	How	Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Prof. San Afri, dan Wakil Ketua DPR RI Komisi IV Dedi Mulyadi memberikan pernyataan yang senada yaitu masuknya perhutanan sosial dalam UU Ciptaker, menunjukkan negara hadir untuk masyarakat.
Struktur Tematik		
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, hubungan antar kalimat	Dalam pemberitaan artikel ini berisi pernyataan awal yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto bahwa Undang Undang Cipta Kerja akan berdampak positif bagi sektor lingkungan hidup terutama pada sektor perhutanan, dan diperkuat lagi dengan tanggapan yang sama oleh dua

		narasumber yang berbeda yaitu Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Prof. San Afri, dan Wakil Ketua DPR RI Komisi IV Dedi Mulyadi.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Penggunaan foto virtual zoom meeting acara Bincang Undang-Undang: Atasi Kesenjangan Multitafsir dengan tema Hutan Sosial yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto. Sudah cukup memperjelas isi pemberitaan pada artikel ini.

Tabel 4.8. Hasil Analisis Artikel Berita 8

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	“Pengamat ekonomi: UU Ciptaker tidak turunkan standar penilaian AMDAL”
	Lead	Pengamat ekonomi San Afri Awang memberikan penilaian mengenai Undang Undang Cipta Kerja yang menurutnya tidak akan menurunkan standar penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL
	Latar Informasi	Pengamat ekonomi San Afri Awang dalam keterangan persnya memberikan pernyataan bahwa Undang Undang Cipta Kerja tidak menurunkan standar dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL menurutnya Undang Undang Cipta Kerja akan dapat mempermudah bagi para pelaku usaha terkait pemberian kemudahan dalam memperoleh persetujuan dan perizinan lingkungan tanpa menurunkan kualitas penilaian melalui analisis dampak lingkungan atau AMDAL.

	Kutipan Sumber	<p>San Afri Awang (Pengamat ekonomi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “UU Cipta Kerja ini untuk menyederhanakan tapi tidak menurunkan kualitas penilaian AMDAL. Dengan demikian, izin dan penyerapan tenaga kerja bisa lebih mudah,” 2. “Pengaturan AMDAL dalam UU Cipta Kerja, secara prinsip dan konsep tidak berubah dari prinsip dan konsep pengaturan dalam ketentuan sebelumnya. Perubahan lebih diarahkan untuk penyempurnaan kebijakan dalam aturan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan UU Cipta Kerja yang beri kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan namun dengan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan,” 3. “Kalau di aturan yang lalu (UU no. 32/2009) dikatakan, setiap usaha yang diperkirakan akan menimbulkan dampak lingkungan, wajib AMDAL. Usaha tahu, di desa, karena ada dampak lingkungan, wajib AMDAL. Dari mana duitnya? Tapi dengan UU Cipta Kerja, cukup NIB saja,”
	Pernyataan Opini	<p>Pengamat ekonomi San Afri Awang menyebutkan bahwa selama ini waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin usaha seperti izin eksplorasi sumber daya alam (SDA) bisa sampai belasan tahun, itu karena terhambat banyak aturan dari level UU, PP sampai proses AMDAL yang lama hal tersebut tentu saja sangat menghambat pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu Undang Undang Cipta Kerja ada untuk</p>

		penyederhanaan mengenai izin lingkungan hidup.
	Penutup	Artikel pemberitaan ini ditutup dengan pemaparan informasi mengenai Undang Undang Cipta Kerja memiliki target mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai target itu harus mengubah banyak peraturan perundang-undangan.
Struktur Skrip		
	What	Pernyataan Pengamat ekonomi San Afri Awang Kementerian mengenai Undang Undang Cipta Kerja yang ia nilai tidak akan menurunkan standar penilaian AMDAL.
	Where	Jakarta, Indonesia
	When	17 Desember 2020
	Who	Pengamat ekonomi San Afri Awang
	Why	Pengamat ekonomi San Afri Awang menegaskan bahwa Undang Undang Cipta Kerja tidak menurunkan standar dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL.
	How	Pengamat ekonomi San Afri mengatakan bahwa UU Cipta Kerja bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat menyederhanakan dan mempercepat AMDAL.
Struktur Tematik		
	Paragraf, Proposisi kalimat, hubungan antar kalimat	Dalam pemberitaan artikel ini berisi tentang informasi yang disampaikan oleh pengamat ekonomi San Afri terkait penelianaanya terhadap Undang Undang Cipta Kerja yang tidak turunkan standar penilaian AMDAL melainkan akan mempermudah perizinan usaha tanpa

		mengesampingkan penilaian terhadap dampak lingkungan.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Penggunaan foto Ilustrasi: Kawasan industri. Pada pemberitaan ini kurang menjelaskan isi dari pemberitaan ini.

Tabel 4.9. Hasil Analisis Artikel Berita 9

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	“Menko Airlangga: Pemerintah jaga pelestarian lingkungan di UU Ciptaker”
	Lead	Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan pernyataan bahwa pemerintah akan berkomitmen menjaga pelestarian lingkungan dengan tiga aturan pelaksanaan dari Undang Undang Cipta Kerja yang terkait lingkungan hidup dan kehutanan.
	Latar Informasi	Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa dalam Undang Undang Cipta Kerja pemerintah akan berkomitmen melakukan pelestarian lingkungan terkait lingkungan hidup dan kehutanan. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyebutkan Undang Undang Cipta Kerja membuat perekonomian masyarakat hutan mengalami peningkatan pasca-Program Perhutanan Sosial yang ada dalam Undang Undang Cipta Kerja.
	Kutipan Sumber	Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) 1. “Bila dikelola secara klaster, kemudian kita dukung dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan diikuti dengan pendampingan, produk yang dihasilkan

		akan memiliki daya saing tinggi, dan harapannya bisa diekspor,”
	Pernyataan Opini	Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan bahwa dengan hadirnya Undang Undang Cipta Kerja dinilai akan semakin menjamin keberlangsungan program Perhutanan Sosial.
	Penutup	Artikel pemberitaan ini ditutup dengan pemaparan informasi mengenai adanya Undang Undang Cipta Kerja juga diharapkan mampu mengurangi ketimpangan penguasaan hutan antara masyarakat luas dengan korporasi.
Struktur Skrip		
	What	Pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa pemerintah akan menjaga pelestarian lingkungan dalam Undang Undang Cipta Kerja .
	Where	Jakarta, Indonesia
	When	12 Desember 2020
	Who	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
	Why	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah dalam Undang Undang Cipta Kerja akan menjaga pelestarian lingkungan terkait lingkungan hidup dan kehutanan.
	How	Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Undang Undang Cipta Kerja dapat memberikan dampak positif serta semakin menjamin keberlangsungan program Perhutanan Sosial.
Struktur Tematik		
	Paragraf, Proposisi kalimat, hubungan antar kalimat	Dalam pemberitaan artikel ini berisi tentang informasi yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang

		Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai komitmen pemerintah dalam Undang Undang Cipta Kerja yang akan berusaha melakukan pelestarian lingkungan hidup.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Penggunaan foto Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang terlihat sedang memberikan pernyataannya sudah cukup memperjelas isi dari pemberitaan pada artikel ini.

Tabel 4.10. Hasil Analisis Artikel Berita 10

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	“Yasonna sebut UU Cipta Kerja lahir atasi benang kusut perizinan”
	Lead	Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan pernyataan bahwa salah satu faktor lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mengatasi benang kusut perizinan.
	Latar Informasi	Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebutkan bahwa Undang Undang Cipta Kerja merupakan Undang Undang yang visioner dikarenakan Undang Undang ini akan mengatasi atasi benang kusut perizinan usaha yang ada di indonesia.
	Kutipan Sumber	Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM) 1. “Ini merupakan sesuatu yang sangat visioner. (UU Cipta Kerja) satu lompatan yang memerlukan keberanian untuk mengambil keputusan tentang perubahan,” 2. "Otonomi daerah kita, kabupaten/kota, daerah, provinsi, yang melalui perda-nya kadang-kadang membuat masalah perizinan menjadi lebih ruwet. Maka

		<p>untuk itu diperlukan suatu upaya yang reformatif,"</p> <p>3. "Maka kita melahirkan UU Cipta Kerja ini, terlepas dari kontroversi yang membayangi-nya, kami yakin bahwa ini sangat baik untuk kepentingan bangsa dan negara untuk memajukan perekonomian kita, dan tentunya pada gilirannya menciptakan lapangan kerja yang luas,"</p> <p>4. "Perizinan adalah tindakan administratif, maka pada dasarnya kalau pelanggaran perizinan itu haruslah sifatnya administratif,"</p> <p>5. "Kita tidak mengatakan tidak perlu sanksi pidana, karena kadang-kadang bisnis juga mau meng-'extend' keuntungan sebesar-besarnya, sehingga dapat berakibat K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan). Itu baru masuk ranah pidananya. Gradasi-nya nanti kita susun secara baik,"</p>
	Pernyataan Opini	<p>Yasonna Laoly Menteri Hukum dan HAM menyebutkan bahwa selama ini banyak investor yang merasa kesulitan saat ingin memproses perizinan dan investasi karena proses perizinan usaha yang berbelit dan dengan adanya Undang Undang Cipta Kerja dapat mempermudah perizinan usaha.</p>
	Penutup	<p>Artikel pemberitaan ini ditutup dengan kutipan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja dilakukan dengan prinsip 'ultimum remedium', yang mengedepankan pengenaan sanksi administratif daripada sanksi pidana.</p>
	What	<p>Pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bahwa Undang Undang</p>

Struktur Skrip		Cipta Kerja menjadi solusi untuk atasi benang kusut perizinan di Indonesia.
	Where	Jakarta, Indonesia
	When	24 Desember 2020
	Who	Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly
	Why	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan selama ini banyak investor yang merasa kesulitan saat ingin memproses perizinan dan investasi karena proses perizinan usaha yang berbelit. selama ini banyak investor yang merasa kesulitan saat ingin memproses perizinan dan investasi karena proses perizinan usaha yang berbelit.
	How	Yasonna Laoly mengatakan bahwa dengan adanya Undang Undang Cipta Kerja dapat memberikan dampak positif serta dapat menyelesaikan benang kusut perizinan.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, hubungan antar kalimat	Dalam pemberitaan artikel ini berisi tentang informasi yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengenai Undang Undang Cipta Kerja yang akan menjadi solusi bagi benang kusut perizinan di Indonesia.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Penggunaan foto Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang terlihat sedang memberikan pernyataannya sudah cukup memperjelas isi dari pemberitaan pada artikel ini.

Tabel 4.11. Hasil Analisis Artikel Berita 11

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	“Horor RUU Cipta Kerja, dari Izin Lingkungan Hilang sampai Lemahkan Sanksi Hukum”
	Lead	Pemerintah telah menyerahkan draf Rancangan Undang Undang Cipta Kerja, ke DPR pada 12 Februari 2020. RUU Cipta Kerja dianggap Hilangkan sampai Lemahkan Sanksi Hukum mengenai isu lingkungan.
	Latar Informasi	Draf Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, sebagai upaya penyederhanaan aturan hukum, dianggap akan melemahkan sanksi hukum bagi izin lingkungan.
	Kutipan Sumber	<p>Reynaldo Sembiring (Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “Makin sempit akses masyarakat untuk upaya hukum terhadap keputusan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup,” 2. “Tidak ada lagi ketegasan dalam UU tentang instansi yang bertanggungjawab dalam pengawasan lingkungan hidup, pengawasan lapis kedua oleh pemerintah pusat, kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup, dan jenis sanksi administrasi.” 3. “Penunjukan subyek hanya ‘pemerintah pusat’ berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam birokrasi. Kewenangan instansi berpotensi lebih mudah diubah karena hanya diatur dalam level peraturan pemerintah,” 4. “Bagaimana dengan pencemaran atau kerusakan yang langsung berdampak catastrophic (menimbulkan) bencana besar namun pembuktian dampak

		<p>kesehatan masyarakatnya tidak dapat dengan mudah terdeteksi? Bagaimana cara menerapkan sanksi administrasi ketika izin lingkungan dihapuskan?”</p> <p>Zenzi Suhadi (Kepala Departemen Advokasi Walhi Nasional)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “Seharusnya perumus RUU harus konsisten membedakan sanksi pidana dan sanksi administrasi.” 2. “Terlebih ada bukti beberapa ketentuan yang direduksi adalah ketentuan pertanggungjawaban hukum yang pernah dicoba diuji oleh APHI dan GAPKI di Mahkamah Konstitusi,” 3. “RUU ini pantas disebut sebagai RUU ‘Cilaka’, karena hanya memperhatikan dan mengakomodir kepentingan bisnis. Sama sekali tak menaruh ruang perlindungan pada hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”
	Pernyataan Opini	<p>Menurut Reynaldo nantinya tidak akan ada lagi ketegasan dalam UU tentang instansi yang bertanggungjawab dalam pengawasan lingkungan hidup, selain itu juga seluruh kewenangan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup jadi kewenangan pemerintah pusat dan penghapusan kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota dihilangkan. Hal tersebut membuat partisipasi masyarakat di dalam UU tersebut akan berkurang.</p>
	Penutup	<p>Artikel pemberitaan ini ditutup dengan penulis yang memberikan informasi mengenai tujuan dari Undang Undang Omnibus law yang diharapkan dapat menghilangkan faktor-faktor utama penghambat pertumbuhan ekonomi secara umum, seperti penyederhanaan regulasi</p>

		dan perbaikan kelembagaan maupun pengaturan pasar tenaga kerja lebih kompetitif.
Struktur Skrip	What	Rancangan Undang Undang Cipta Kerja dinilai sebagai upaya penyederhanaan aturan hukum, dan tanggapan dari berbagai kalangan mengkhawatirkan isu pelemahan perizinan lingkungan dalam Rancangan Undang Undang Cipta Kerja.
	Where	Jakarta, Indonesia
	When	14 February 2020
	Who	Reynaldo Sembiring (Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law), Zeni Suhadi (Kepala Departemen Advokasi Walhi Nasional)
	Why	Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang dianggap melemahkan serta menghilangkan perizinan mengenai dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dari pembangunan perusahaan
	How	Dalam RUU Cipta Kerja, seluruh kewenangan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup jadi kewenangan pemerintah pusat dan penghapusan kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota dihilangkan.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, hubungan antar kalimat	Keseluruhan artikel ini berisi tentang informasi mengenai Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang banyak menuai anggapan yang kurang baik dari berbagai pihak, salah satu anggapan tersebut muncul dari Reynaldo Sembiring selaku Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law, yang menganggap bahwa Rancangan Undang Undang Cipta

		Kerja akan melemahkan perizinan lingkungan hidup di dalamnya.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Penulis pada artikel ini menggunakan foto berupa kebakaran hutan yang menggambarkan kerusakan lingkungan yang nantinya akan terjadi sudah sangat tepat pada pemberitaan ini, ditambah lagi dengan adanya dua ilustrasi mengenai pasal-pasal yang terdampak dari adanya Rancangan Undang Undang Cipta Kerja menambahkan informasi penting kepada pembaca. Serta penggunaan judul pada pemberitaan ini juga menggunakan idiom dengan kalimat “Horor” yang menggambarkan Undang Undang Cipta Kerja seperti mengerikan.

Tabel 4.12. Hasil Analisis Artikel Berita 12

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	“RUU Cipta Kerja Dinilai Ancam Masyarakat dan Lingkungan, Apa Kata Mereka?”
	Lead	Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, merupakan aturan hukum ‘sapu jagat’ (omnibus law) usulan pemerintah ke DPR, yang menimbulkan ketakutan, antara lain dalam isu lingkungan, maupun sosial masyarakat.
	Latar Informasi	Draft Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, diharapkan sebagai upaya penyederhanaan aturan hukum, malah berpotensi merenggut ruang hidup warga. Berbagai kalangan protes dan bersuara kritis menyikapi draf RUU ini.
	Kutipan Sumber	Muhammad Arman (Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)

		<p>1. “Saya khawatir, bahkan sebelum ada RUU ini sekalipun, sudah banyak konflik terjadi berhubungan dengan investasi-investasi skala besar, seperti tambang dan perkebunan,”</p> <p>2. “Tanpa ada pengakuan hak rakyat maupun masyarakat adat terhadap wilayah hak, justru RUU ini akan memunculkan konflik baru. Ini jadi predator yang bisa membunuh siapapun.”</p> <p>Rukka Sombolinggi (Sekjend Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)</p> <p>1. “Kita tidak bisa bicara tentang perhutanan sosial dan seterusnya dalam konteks ini,”</p> <p>2 “Dalam kehutanan terkait pemanfaatan yang dipercepat BUMN, BUMD dan BUMS, sekarang seperti apa? Kemudian pernyataan untuk mempercepat perhutanan sosial, itu dimana ya? Itu tidak ada.”</p> <p>Zenzi Suhadi (Kepala Departemen Advokasi Walhi)</p> <p>1. “Perubahan ketentuan pidana ini mengisyaratkan pemerintah akan berkompromi dengan korporasi, karena pidana tergantung dengan step pemerintah,”</p> <p>Bambang Hero Saharjo (Guru Besar IPB)</p> <p>1. “Kalau sudah proses pembuktian, biasa kita berhadapan tidak hanya kepada lawan, juga mereka yang memimpin, yang tidak paham kondisi proses pembuktian. Frasa itu, yang memimpin sidang pun paham, tanpa harus dibuktikan ke penggugat, tinggal pihak sana yang membuktikan. Kuncinya itu di proses pembuktian.”</p>
--	--	---

		<p>Nining Elitos (Ketua Umum Organisasi Buruh Kasbi)</p> <p>1. “Melalui regulasi ini, pemerintah hanya mendorong terciptanya lapangan kerja baru dengan mengabaikan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja.”</p> <p>2. “Pemerintah mengundang buruh hanya untuk sosialisasi, buruh tidak diajak membahas draf RUU.</p> <p>3. “Saya meyakini regulasi omnibus law ini akan mengorbankan banyak masyarakat, tidak hanya buruh juga petani, masyarakat adat, pelajar, nelayan, dan lain-lain.”</p>
	Pernyataan Opini	<p>Greenpeace Indonesia menilai, omnibus law ini akan memperburuk krisis iklim di Indonesia.</p> <p>Nining Elitos menyatakan bahwa regulasi yang ada pada Rancangan Undang Undang Cipta Kerja ini hanya mendorong terciptanya lapangan kerja baru dengan mengabaikan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja.</p>
	Penutup	<p>Artikel pemberitaan ini ditutup dengan kutipan yang diambil dari pernyataan Nining Elitos yang menyebutkan bahwa regulasi omnibus law ini akan mengorbankan banyak masyarakat, tidak hanya buruh juga petani, masyarakat adat, pelajar, nelayan, dan lain-lain.</p>
Struktur Skrip	What	<p>Tanggapan beberapa orang mulai dari Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Guru Besar, Hingga Ketua Umum Organisasi Buruh Kasbi mengenai Rancangan Undang Undang Cipta Kerja</p>

		yang dinilai ancam masyarakat dan lingkungan.
	Where	Jakarta, Indonesia
	When	20 February 2020
	Who	Muhammad Arman (Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), Zeni Suhadi (Kepala Departemen Advokasi Walhi Nasional), Rukka Sombolinggi (Sekjend Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), Bambang Hero Saharjo (Guru Besar IPB), Nining Elitos (Ketua Umum Organisasi Buruh Kasbi).
	Why	Dampak buruk dari Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang dianggap akan mengancam masyarakat dan lingkungan, serta akan memperburuk krisis iklim di Indonesia.
	How	Penilaian dari beberapa ahli bahwa Rancangan Undang Undang Cipta Kerja ini hanya akan membahayakan lingkungan.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, hubungan antar kalimat	Secara keseluruhan artikel ini berisi tentang tanggapan dari berbagai pihak yang menilai bahwa Rancangan Undang Undang Cipta Kerja dapat menjadi ancaman bagi masyarakat serta lingkungan.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Penulis pada artikel ini menggunakan foto berupa penggundulan hutan yang menggambarkan kerusakan lingkungan yang nantinya akan terjadi sudah sangat tepat pada pemberitaan ini, ditambah lagi dengan adanya dua ilustrasi mengenai pasal-pasal yang terdampak dari adanya Rancangan Undang Undang Cipta Kerja

		menambahkan informasi penting kepada pembaca.
--	--	---

Tabel 4.13. Hasil Analisis Artikel Berita 13

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	“Bisa Celakakan Lingkungan, Banyak Kalangan Protes RUU Omnibus Law”
	Lead	Berbagai kalangan organisasi masyarakat sipil, organisasi lingkungan, buruh dan lain-lain memberikan protesnya terhadap Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang bisa mencelakakan lingkungan.
	Latar Informasi	Draft Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, berpotensi mencelakakan lingkungan hidup. Beberapa pasal yang memiliki aspek perlindungan justru dihapuskan, dengan dalih untuk mempermudah investasi.
	Kutipan Sumber	Zenzi Suhadi (Kepala Departemen Advokasi Walhi) 1. “Saya pikir draf RUU ini tak layak dibaca orang yang dalam keadaan waras. Isinya di luar logika. Kami melihat sedang ada upaya reinstall terhadap bangsa dan alam Indonesia. Ibarat mau diformat kembali,” 2. “Di Pasal 24 sampai 29 yang berkaitan dengan amdal dan izin lingkungan. Kalau sebelumnya amdal itu jadi syarat izin lingkungan dan izin lingkungan jadi syarat izin usaha. Sekarang, izin lingkungan jadi bagian dari izin usaha. Amdal statusnya bukan lagi prasyarat tetapi faktor yang dipertimbangkan,” 3. “Jadi yang diberikan ruang mengajukan gugatan itu hanya siapa saja yang terdampak langsung. Kalau kita periksa hak orang yang terdampak langsung,

		<p>sebenarnya ruang yang seperti apa yang diberikan?”</p> <p>4. “Lewat Pasal 88 UU 32/2009, kalau titik api berada di dalam wilayah izin perusahaan, ada tanggungjawab mutlak perusahaan. Mereka tak perlu membuktikan bagaimana itu terbakar dan siapa yang membakar,”</p> <p>5. “Pidana baru bisa berjalan kalau proses sanksi administrasi sudah berjalan atau diputuskan di pemerintah.”</p> <p>Amin Multazam (Direktur Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)</p> <p>1. “RUU ini tak menaruh ruang perlindungan pada hak warga negara atas lingkungan hidup yang sehat,”</p> <p>2 “Dalam kehutanan terkait pemanfaatan yang dipercepat BUMN, BUMD dan BUMS, sekarang seperti apa? Kemudian pernyataan untuk mempercepat perhutanan sosial, itu dimana ya? Itu tidak ada.”</p> <p>Rudi Hermanto, (Anggota DPRD Sumatera Utara)</p> <p>1. “Kami akan teruskan ini ke DPR dan pihak terkait. Mohon nanti diserahkan ke kami poin apa dalam RUU omnibus law yang tidak sejalan. Tak [boleh] ada kriminalisasi dan penindasan terhadap rakyat, karena itu akan kita lawan.”</p>
	Pernyataan Opini	Abdul Halim Sembiring, dari Advokasi dan Kajian Bakumsu menyatakan, RUU ini hanya akan melanggengkan ketimpangan agraria dan hanya mementingkan investasi tanpa melihat dan memperhatikan dampak lingkungan.
	Penutup	Penulis menutup artikel ini dengan penekanan berupa keterangan foto

		kebakaran hutan serta penjelasan “Sekarang saja hutan di Indonesia, sudah begitu terancam, apatah lagi kalau ada UU Omnibus Law.”
Struktur Skrip	What	Rancangan Undang Undang Cipta kerja dianggap dapat celakakan lingkungan.
	Where	Sumatera Utara, Indonesia
	When	18 Maret 2020
	Who	Zenzi Suhadi (Kepala Departemen Advokasi Walhi), Amin Multazam (Direktur Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Rudi Hermanto, (Anggota DPRD Sumatera Utara)
	Why	Berbagai kritik serta protes dari beberapa kalangan terhadap Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai dapat celakakan lingkungan hidup.
	How	Munculnya aksi demosntrasi di Sumatera Utara yang menolak Rancangan Undang-undang Cipta Kerja.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, hubungan antar kalimat	Secara keseluruhan artikel ini berisi tentang beberapa tanggapan serta aksi yang dilakukan oleh beberapa kalangan organisasi mengenai Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai dapat mencelakan lingkungan hidup.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Penulis pada artikel ini menggunakan foto berupa kebakaran hutan yang menggambarkan kerusakan lingkungan yang nantinya akan terjadi sudah sangat tepat pada pemberitaan ini, pada pemberitaan ini juga memiliki liputan video mengenai aksi demonstrasi menolak Rancangan Undang-undang Cipta Kerja

		yang ada di Sumatera Utara membuat berita ini semakin memberikan informasi kepada para pembaca.
--	--	---

Tabel 4.14. Hasil Analisis Artikel Berita 14

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	“Nasib Suram Hutan Negeri, Ada Omnibus Law, Makin Buram”
	Lead	Hutan Indonesia, bakal makin terancam. Kehadiran Rancangan UU Cipta Kerja yang menyederhanakan segala aturan termasuk UU Kehutanan, bikin was-was.
	Latar Informasi	Rancangan Undang-undang Cipta Kerja dianggap akan menjadikan hutan di Indonesia menjadi suram, dikarenakan UU Cipta Kerja, yang berisi penyederhanaan berbagai aturan (omnibus law), termasuk UU Kehutanan dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. .
	Kutipan Sumber	Teguh Surya (Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan) 1. “Analisisnya akan rontok semua upaya yang selama ini kita lindungi. Omnibus law ini secara skema bagus, tapi substansi ingin membatalkan semua aturan safeguard yang selama ini kita perjuangkan,” 2. “Omnibus law ini bukan jawaban, jika mau omnibus law, harusnya lahir dari kajian KPK terkait revidi Undang-undang dan kebijakan terkait sumber daya alam. Itu yang harus dibuat omnibus law,” 3. “Dalam omnibus law inipun pemegang izin tak lagi bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan di areal kerja mereka, hanya wajib upaya pencegahan dan pengendalian,”

		<p>Bambang Supriyanto (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan)</p> <p>1. “Dengan program pemberdayaan atau pendampingan rakyat mengelola hutan untuk peningkatan produktivitas dan peningkatan nilai tambah melalui prosesi produk dan pasar baik lokal maupun internasional,”</p>
	Pernyataan Opini	Teguh Surya memberikan pernyataannya mengenai Rancangan Undang Undang Cipta Kerja ini, dia menilai pesimis kelestarian hutan Indonesia seiring RUU Cipta Kerja yang sedang dikerjakan pemerintah dan DPR.
	Penutup	Penulis menutup artikel ini dengan penekanan berupa keterangan foto infografis yang menunjukkan kawasan hutan Indonesia tercatat seluas 146 juta hektar, pada 1999-2009 jadi luas 134 juta hektar dan 2009 hingga kini hanya tinggal sekitar 126 juta hektar.
Struktur Skrip	What	Nasib hutan Indonesia dengan adanya Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja.
	Where	Jakarta, Indonesia
	When	21 Maret 2020
	Who	Teguh Surya (Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan), Bambang Supriyanto (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan).
	Why	Hutan di Indonesia akan semakin terancam dengan adanya Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang mengubah UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
	How	RUU Cipta Kerja, menyebutkan, pemegang izin tak lagi bertanggung jawab terhadap

		kebakaran hutan di areal kerja, hanya wajib upaya pencegahan dan pengendalian.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, hubungan antar kalimat	Secara keseluruhan artikel ini berisi tentang beberapa informasi yang ingin disampaikan kepada para pembaca bagaimana nasib Hutan di Indonesia dengan adanya regulasi baru yang akan datang melalui RUU Cipta Kerja.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Penulis pada artikel ini masih belum terlalu jelas dalam penyampaian kata serta gambar, penggunaan gambar hutan hijau masih kurang jelas menggambarkan artikel ini, namun dalam artikel ini memiliki infografis berupa kawasan hutan Indonesia dari tahun ke tahun membuat pembaca mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Tabel 4.15. Hasil Analisis Artikel Berita 15

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	“RUU Cipta Kerja Ketok Palu, Lonceng Bahaya bagi Lingkungan Hidup?”
	Lead	Protes dan kritikan datang dari berbagai kalangan, namun pemerintah dan DPR terus membahas Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Hingga akhirnya RUU ini disahkan menjadi Undang Undang. RUU ini berisi penyederhanaan sekitar 79 aturan hukum di negeri ini agar ‘ramah’ investasi, atau biasa disebut omnibus law.
	Latar Informasi	Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang Undang oleh DPR menjadi peringatan tentang bahaya lingkungan hidup kedepannya di Indonesia. Karena berbagai kalangan menganggap bahwa Undang

		Undang ini akan membahayakan lingkungan.
	Kutipan Sumber	<p>Teguh Surya (Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan)</p> <p>1. “Dari analisis kami, dari beberapa jenis izin di atas daratan Indonesia ini, ternyata 75,6% dari luas daratan Indonesia itu sudah dibebani izin. Sudah ada peruntukan, sudah diokupasi.”</p> <p>Arie Rompas (Greenpeace Indonesia)</p> <p>1. “RUU Cipta Kerja memprioritaskan deregulasi investasi yang didesain pemerintah untuk menghilangkan hak-hak rakyat juga melemahkan perlindungan lingkungan.”</p> <p>2. “Sudah pasti hak-hak rakyat diabaikan,”</p> <p>3. “Mereka menghapus ketentuan pemegang izin bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan yang terjadi di areal kerjanya.”</p>
	Pernyataan Opini	Arie Rompas memberikan pernyataannya mengenai Undang Undang Cipta Kerja ini tidak akan berjalan dengan sempurna, dia menilai alih alih mengesahkan Undang Undang, lebih baik pemerintah berfokus menangani pandemi terlebih dahulu.
	Penutup	Penulis menutup artikel ini dengan pernyataan yang diberikan oleh Arie Rompas yang menyebutkan bahwa dalam Undang Undang Cipta Kerja banyak kewenangan yang terpangkas mengenai izin lingkungan demin masuknya investasi.
Struktur Skrip	What	Pengesahan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja menjadi lonceng bahaya bagi lingkungan di Indonesia.
	Where	Jakarta, Indonesia
	When	5 Oktober 2020

	Who	Teguh Surya (Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan), Arie Rompas (Greenpeace Indonesia)
	Why	Undang Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR dinilai banyak pihak berbahaya bagi lingkungan.
	How	Berbagai kalangan, baik buruh, mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil berencana aksi massal pada 6-8 Oktober 2020 guna menolak Undang Undang Cipta Kerja.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, hubungan antar kalimat	Secara keseluruhan artikel ini berisi tentang informasi mengenai pengesahan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh DPR, serta juga pemaparan informasi mengenai dampak yang akan ditimbulkan kepada lingkungan setelah disahkannya Undang Undang Cipta Kerja oleh DPR.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Penulis pada artikel ini masih belum terlalu jelas dalam penyampaian kata serta gambar, penggunaan foto pemukiman kumuh di daerah sungai kurang jelas menggambarkan aritkel ini.

Tabel 4.16. Hasil Analisis Artikel Berita 16

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	“UU Cipta Kerja Melegalkan Deforestasi dan Degradasi Hutan”
	Lead	Jika diperhatikan dalam Undang Undang Cipta kerja memberikan aturan baru maupun perubahan pasal yang memperlonggar bahkan cenderung memberikan ruang bagi pengurangan

		(deforestasi) dan penghancuran kawasan hutan (degradasi).
	Latar Informasi	Pasal Pasal dalam Undang Undang Cipta Kerja yang berpotensi memberikan ruang dalam pelegelan deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia.
	Kutipan Sumber	Tidak ada kutipan narasumber pada artikel pemberitaan ini
	Pernyataan Opini	Seluruh pemberitaan yang ada pada artikel ini merupakan hasil opini sang penulis terkait bahaya dari Undang Undang Cipta Kerja yang melegalkan deforestasi dan degradasi hutan.
	Penutup	Penulis menutup artikel ini dengan pernyataan yang ia berikan bahwa pemerintah selama ini telah gagal menahan laju deforestasi dan degradasi hutan. Dengan adanya UU Cipta Kerja sepertinya pemerintah justru ingin melegalkan kegagalannya tersebut, agar tak terus-terusan disebut melanggar hukum.
Struktur Skrip	What	Pasal dalam Undang Undang Cipta Kerja melegalkan deforestasi dan degradasi hutan.
	Where	Jakarta, Indonesia
	When	7 Oktober 2020
	Who	-
	Why	Bahaya dari Undang Undang Cipta Kerja yang melegalkan deforestasi dan degradasi hutan.
	How	Perubahan pasal pasal yang ada dalam Undang Undang Cipta kerja melonggarkan perizinan tentang alam dan juga hutan.

Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, hubungan antar kalimat	Secara keseluruhan artikel ini berisi tentang informasi mengenai Undang Undang Cipta kerja memberikan regulasi baru maupun perubahan pasal yang dianggap memperlonggar bahkan cenderung memberikan ruang bagi pengurangan (deforestasi) dan penghancuran kawasan hutan (degradasi). Serta artikel pemberitaan ini juga memberikan informasi mengenai pasal pasal yang diduga akan menjadi masalah bagi lingkungan terutama hutan.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Penulis pada artikel menggunakan foto berupa penggundulan hutan yang menggambarkan kerusakan lingkungan, ditamhab dengan penjelasan foto tersebut memberikan ilustrasi pengexploitasian hutan yang gencar dilakukan di Indonesia sudah sangat tepat pada pemberitaan ini.

Tabel 4.17. Hasil Analisis Artikel Berita 17

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	“Kesimpangsiuran Informasi di Balik Undang-Undang Cipta Kerja”
	Lead	Tepat pada 5 Oktober 2020, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan Undang Undang Cipta Kerja mendapatkan berbagai tanggapan dari para kalangan masyarakat mulia dari tanggapan yang pro terhadap Undang Undang ini hingga ada juga yang kontro terkait UndanG Undang ini.
	Latar Informasi	Ketidakpastian yang berujung pada informasi yang simpang siur di tengah publik mengenai Undang Undang Cipta

		Kerja yang regulasi pro terhadap lingkungan serta rakyat atau kontra.
	Kutipan Sumber	Tidak ada kutipan narasumber pada artikel pemberitaan ini
	Pernyataan Opini	Seluruh pemberitaan yang ada pada artikel ini merupakan hasil opini sang penulis terkait ketidak jelasan Undang Undang Cipta Kerja yang regulasi pro.
	Penutup	Penulis menutup artikel ini dengan pernyataan yang ia berikan tentang bagaimana masyarakat semua berada dalam ketidakpastian, tidak hanya masyarakat tapi juga pemerintah. Padahal, kepastian adalah sebuah keniscayaan untuk saat ini, apalagi bagi sebuah investasi dan mau dibawa kemana arah bangsa ini.
Struktur Skrip	What	Kesimpangsiuran Informasi yang ada pada Undang-Undang Cipta Kerja.
	Where	Jakarta, Indonesia
	When	17 Oktober 2020
	Who	-
	Why	Ketidak jelasan Undang Undang Cipta Kerja yang regulasi pro terhadap lingkungan serta rakyat atau kontra terhadap lingkungan dan juga rakyat.
	How	Adanya beberapa pasal dalam Undang Undang Cipta kerja yang dianggap masih tidak jelas dalam regulasinya terhadap lingkungan hidup.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, hubungan antar kalimat	Secara keseluruhan artikel ini berisi tentang informasi mengenai Undang Undang Cipta kerja yang banyak menuai beragam argumen dari banyak sudut pandang tentang ketidakadilan Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah diutarakan

		sejak RUU Cipta Kerja dilempar kepada publik.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Penulis pada artikel menggunakan foto berupa ilustrasi dari tampak tiga hutan yang berbeda hal ini sangat cocok untuk menggambarkan judul dari pemberitaan ini, yang mana ilustrasi dari tampak tiga hutan yang berbeda ini menjelaskan bagaimana kesimpangsiuran aturan serta regulasi dari Undang Undang Cipta Kerja.

Tabel 4.18. Hasil Analisis Artikel Berita 18

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	“Perlukan Rancangan Peraturan Pemerintah Dibuat sebagai Turunan UU Cipta Kerja?”
	Lead	Subsektor perikanan tangkap kini tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR RI beberapa waktu lalu.
	Latar Informasi	Pembahasan serta informasi mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah yang dibuat sebagai turunan dari Undang Undang Cipta Kerja pada sektor pemberdayaan kelautan dan perikanan agar tidak terjadinya eksploitasi yang diakibatkan Undang Undang Cipta Kerja.
	Kutipan Sumber	Muhammad Zaini (Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP) 1. “Tujuannya, untuk mengurai hambatan yang selama ini mempersulit investasi. Mudah-mudahan perikanan tangkap akan menjadi bisa berkembang pesat.” 2. “Dan juga bagaimana kita mengelola SDI agar mendapat manfaat ekonomi

		<p>secara optimal. Jadi dua-duanya dipertimbangkan secara seksama,”</p> <p>3. “Juga memberi pertimbangan tentang tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, dan alokasi sumber daya ikan di setiap WPP-NRI. Dalam RPP ini dijawab bahwa Komnas Jiskan masih ada,”</p> <p>Hendra Yusran Siry (Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP)</p> <p>1. “Juga pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan atau yang termasuk dalam Appendiks CITES, dan produksi garam pada tambak dengan luasan lebih dari lima ratus hektare,”</p> <p>2. “Selain kriteria di atas, masyarakat lokal harus berdomisili di wilayah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat sepuluh tahun tidak berturut-turut,”</p> <p>Susan Herawati (Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan)</p> <p>1. “Dalam rangka penanaman modal asing, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.”</p>
	Pernyataan Opini	Susan Herawati memberikan pernyataannya mengenai Undang Undang Cipta Kerja ini adalah bagian dari upaya memberi legalisasi kepada Pemerintah Indonesia dalam mengatur sektor kelautan dan perikanan dengan cara melaksanakan penghancuran laut secara massal.
	Penutup	Penulis menutup artikel ini dengan pernyataan yang diberikan oleh Susan

		Herawat yang menyebutkan pasal pasal yang ada dalam UU Cipta Kerja tersebut menghilangkan syarat-syarat penting, terutama pertimbangan sosial, ekologis, dan juga budaya. Dengan demikian, perlindungan ekosistem pesisir laut, dan pulau-pulau kecil, akan semakin masif dilakukan setelah disahkannya RUU tersebut.
Struktur Skrip	What	Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang disiapkan menjadi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja pada sektor kelautan dan perikanan.
	Where	Jakarta, Indonesia
	When	16 November 2020
	Who	Muhammad Zaini (Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP), Hendra Yusran Siry (Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP), Susan Herawati (Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan).
	Why	Undang Undang Cipta Kerja dianggap akan berdampak pada eksploitasi laut serta perikanan, oleh karena itu akan diterbitkanlah Rancangan Peraturan Pemerintah.
	How	Rancangan Peraturan Pemerintah disiapkan demi mengatur sektor kelautan serta perikanan yang tidak jelas pada Undang Undang Cipta Kerja.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, hubungan antar kalimat	Secara keseluruhan artikel ini berisi tentang informasi mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan menjadi turunan dari Undang Undang Cipta Kerja pada sektor kelautan serta perikanan, artikel ini juga memberikan pemaparan

		informasi mengenai dampak yang akan ditimbulkan kepada laut setelah disahkannya Undang Undang Cipta Kerja oleh DPR.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Penulis pada artikel ini sudah cukup jelas dalam penyampaian kata serta gambar, penggunaan foto beberapa nelayan yang sedang menjaring ikan dilaut sangat jelas menggambarkan isi artikel ini.

Tabel 4.19. Hasil Analisis Artikel Berita 19

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	“UU Cipta Kerja, Revisi UU Minerba, dan Terbukanya Gerbang Krisis Iklim”
	Lead	Meskipun sempat beredar beberapa versi, substansi dari UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 khususnya pada persoalan lingkungan dan sektor energi, relatif tidak berubah.
	Latar Informasi	Informasi mengenai Revisi Undang Undang di sektor Minerba yang terus terusan terjadi, hal ini diakibatkan oleh peluang adanya Krisis Iklim dikarenakan regulasi yang tidak jelas pada Undang Undang Cipta Kerja.
	Kutipan Sumber	Tidak ada kutipan narasumber pada artikel pemberitaan ini
	Pernyataan Opini	Seluruh pemberitaan yang ada pada artikel ini merupakan hasil opini sang penulis terkait krisis Iklim yang berpotensi terjadi akibat Undang Undang Cipta kerja.
	Penutup	Penulis menutup artikel ini dengan pernyataan yang ia berikan tentang bagaimana pengesahan Undang Undang Cipta Kerja dan Minerba yang tidak berpihak pada energi terbarukan nampaknya mengaburkan rencana itu. Padahal realitas tentang perubahan iklim sudah menampakkan gejalanya, bahwa

		tanpa diiringi tindakan adaptasi dan mitigasi, perubahan iklim adalah moral hazard yang semakin mengancam di masa depan.
Struktur Skrip	What	Keterkaitan Undang Undang Cipta Kerja, Revisi UU Minerba, hingga krisis iklim.
	Where	-
	When	18 November 2020
	Who	-
	Why	Krisis Iklim yang berpotensi terjadi akibat Undang Undang Cipta kerja dan juga Undang Undang Minerba.
	How	Revisi isi UU Minerba dan UU Cipta Kerja yang mengesampingkan isu krisis ekologi dan cenderung pro investor, menjadi awal mula akan terjadinya krisis iklim.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, hubungan antar kalimat	Secara keseluruhan artikel ini berisi tentang informasi mengenai opini sang penulis bahwa adanya Keterkaitan Undang Undang Cipta Kerja, Revisi UU Minerba, hingga krisis iklim yang akan terjadi. Selain itu juga Undang Undang Cipta Kerja yang dianggap cenderung pro investor dan para pelaku usaha tanpa mementingkan aspek ekologi dan lingkungan akan membuat krisis iklim akan terjadi di Indonesia.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Penulis pada artikel menggunakan foto berupa kawasan industri yang mengeluarkan asap tebal dari Kawasan tersebut, dalam hal ini penulis berusaha menggambarkan krisis iklim yang nantinya terjadi bli eksploitasi serta pembangunan terus terjadi akibat

		longgarnya perizinan usaha pada regulasi Undang Undang Cipta Kerja.
--	--	---

Tabel 4.20. Hasil Analisis Artikel Berita 20

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	“Kedaulatan Pangan Makin Suram di Era UU Cipta Kerja”
	Lead	UU Cipta Kerja hadir bukan malah menguatkan kedaulatan maupun kemandirian pangan, malah sebaliknya. Berbagai kalangan menilai, kedaulatan pangan Indonesia, malah terancam.
	Latar Informasi	Undang Undang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang Undang oleh DPR tidak memberikan solusi sama sekali dalam kedaulatan pangan. Selanjutnya berkaitan dengan perkebunan. Dalam UU Cipta Kerja, ada perubahan visi pembangunan pertanian pangan di Indonesia menuju kedaulatan pangan.
	Kutipan Sumber	Henry Saragih (Ketua Umum Serikat Petani Indonesia) 1. “Sudah tidak ada lagi klausa mengutamakan produksi dalam negeri. Bisa dikatakan dengan UU Cipta Kerja ini ada legalisasi impor pangan yang sudah ada selama ini tanpa ada persetujuan dari kementerian dan sebagainya. Itu paling mendasar,” 2. “Jelas sekali perubahannya. Sebelumnya kebun yang difasilitasi dari dalam kawasan HGU, dengan UU Cipta Kerja ini ditegaskan di luar areal HGU.” 3. “Jelas sekali perubahannya. Sebelumnya kebun yang difasilitasi dari dalam kawasan HGU, dengan UU Cipta Kerja ini ditegaskan di luar areal HGU.”

	<p>Dwi Andreas Santosa (Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia)</p> <p>1. “Tidak peduli apakah produksi dalam negeri cukup atau tidak, impor pangan bisa dilakukan,”</p> <p>Rayhana Anwarie (Bina Desa)</p> <p>1. “Alih fungsi lahan akan berdampak kepada perempuan, sebab mereka akan dijauhkan dari pangan. Ketika lahan lahan ini dialihfungsikan perempuan tidak bisa mengakses. Mau tidak mau, mereka harus keluar dari desa jadi tenaga kerja murah seperti asisten rumah tangga atau buruh migran,”</p>	
Pernyataan Opini	Henry Saragih memberikan pernyataannya mengenai Undang Undang Cipta Kerja ini tidak akan memberikan dampak buruk bagi kedaulatan pangan Indonesia, dan kedaulatan pangan malah akan terancam dengan ada UU Cipta Kerja.	
Penutup	Penulis menutup artikel ini dengan pernyataan yang diberikan oleh Dwi Andreas Santosa yang menyebutkan bahwa dalam Undang Undang Cipta Kerja merupakan salah langkah mengintegrasikan total sistem pangan Indonesia dengan sistem pangan dunia.	
Struktur Skrip	What	Dampak Undang Undang Cipta Kerja pada kedaulatan pangan di Indonesia.
	Where	Bandung, Indonesia
	When	7 Desember 2020
	Who	Henry Saragih (Ketua Umum Serikat Petani Indonesia), Dwi Andreas Santosa (Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia), Rayhana Anwarie (Bina Desa)

	Why	Undang Undang Cipta Kerja dianggap mengancam kedaulatan pangan di indonesia.
	How	Berbagai pasal mengenai pangan yang ada di UU Cipta Kerja dinilai berbagai kalangan hanya akan memperkeruh kedaulatan pangan.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, hubungan antar kalimat	Secara keseluruhan artikel ini berisi tentang informasi mengenai pemberitaan dan juga kutipan dari beberapa serikat petani yang menyoroti Undang Undang Cipta Kerja yang mereka nilai mengancam kedaulatan pangan di Indonesia.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Penulis pada artikel ini masih belum terlalu jelas dalam penyampaian kata serta gambar, penggunaan foto beberapa orang yang sedang melakukan kegiatan pemotongan pohon kelapa masih belum jelas menggambarkan aritkel ini.

Lampiran 4. Artikel Antaranews.com dan Mongabay.co.id

ARTIKEL Antaranews.com

1. <https://www.antaraneews.com/berita/1302442/icel-minta-pemerintah-pertimbangan-ulang-penghapusan-izin-lingkungan>

TOP NEWS | TERKINI | TENTANG KAMI

ANTARA
KANTOR BERITA INDONESIA

Senin, 30 Mei 2022

HOME POLITIK HUKUM EKONOMI METRO SEPAKBOLA OLAHRAGA HUMANIORA LIFESTYLE HIBURAN NUSANTARA DUNIA ENGLISH

FOKUS INFOGRAFIK FOTO VIDEO TEKNO OTOMOTIF WARTA BUMI KARKHAS ANTI HOAX ANTARA INTERAKTIF RAMADHAN RILIS PERS INDEKS

ICEL minta pemerintah pertimbangan ulang penghapusan izin lingkungan



Ilustrasi - Sejumlah pengunjung rasa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan membentangkan poster saat aksi stop tambang galian C di Mojokerto di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/1/2020).
ANTARA FOTO/Zabur Karuru/aww.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) Raynaldo G. Sembiring mengharapkan pemerintah mempertimbangkan ulang penghilangan izin lingkungan dari tambang galian C di Mojokerto, Jawa Timur.

DATA PERKEMBANGAN COVID-19

DIRAWAT		
2.871		
TERKONFIRMASI	SEMBUH	MENINGGAL
6.054.633 +218	5.895.176	156.586
DATA PER PROVINSI		
Sumber: covid19.go.id last update: 30-05-2022 20:10 WIB		

TERPOPULER TERKOMENTARI

- Berburu camilan Thailand di hari terakhir pameran mamin**
- Liga Spanyol**
Marcos Alonso kabarnya sudah sepakat gabung Barcelona
- Liga Inggris**
Todd Boehly rampungkan akuisisi Chelsea senilai Rp78 triliun
- Liga Prancis**
Deschamps sebut Mbappe senang

2. <https://www.antaraneews.com/berita/1311258/stafsus-presiden-ruu-omnibus-law-cipta-kerja-tetap-atur-amdal>

TOP NEWS | TERKINI | TENTANG KAMI



Senin, 30 Mei 2022

HOME POLITIK HUKUM EKONOMI METRO SEPAKBOLA OLAHRAGA HUMANIORA LIFESTYLE HIBURAN NUSANTARA DUNIA ENGLISH

FOKUS INFOGRAFIK FOTO VIDEO TEKNO OTOMOTIF WARTA BUMI KARKHAS ANTI HOAX ANTARA INTERAKTIF RAMADHAN RILIS PERS INDEKS

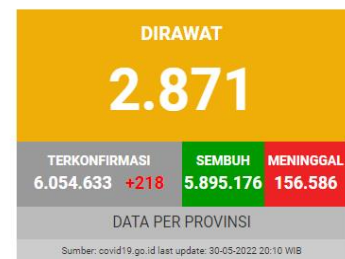
Stafsus Presiden: RUU "Omnibus Law" Cipta Kerja tetap atur amdal



Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono dalam diskusi terkait rancangan Omnibus Law Cipta Kerja di gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat (21/2). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

“Masalah lingkungan di RUU Cipta Kerja tetap ada amdal,

DATA PERKEMBANGAN COVID-19



TERPOPULER TERKOMENTARI

- Berburu camilan Thailand di hari terakhir pameran mamin**
- Liga Spanyol**
Marcos Alonso kabarnya sudah sepakat gabung Barcelona
- Liga Inggris**
Todd Boehly rampungkan akuisisi Chelsea senilai Rp78 triliun
- Liga Prancis**
Deshaqne cegah Mbappe penerusan

3. <https://www.antaranews.com/berita/1653522/ruu-cipta-kerja-perlu-keseimbangan-lingkungan-pembangunan-ekonomi>

TOP NEWS | TERKINI | TENTANG KAMI



Senin, 30 Mei 2022

HOME POLITIK HUKUM EKONOMI METRO SEPAKBOLA OLAHRAGA HUMANIORA LIFESTYLE HIBURAN NUSANTARA DUNIA ENGLISH

FOKUS INFOGRAFIK FOTO VIDEO TEKNO OTOMOTIF WARTA BUMI KARKHAS ANTI HOAX ANTARA INTERAKTIF RAMADHAN RILIS PERS INDEKS

RUU Cipta Kerja perlu keseimbangan lingkungan-pembangunan ekonomi



Anggota Komisi IV DPR, Hamid Noor Yasin. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS

“Lingkungan hidup yang baik adalah jantung ekonomi masyarakat-rakyat banyak”

DATA PERKEMBANGAN COVID-19

DIRAWAT		
2.871		
TERKONFIRMASI	SEMBUH	MENINGGAL
6.054.633 +218	5.895.176	156.586
DATA PER PROVINSI		
Sumber: covid19.go.id last update: 30-05-2022 20:10 WIB		

TERPOPULER TERKOMENTARI



Berburu camilan Thailand di hari terakhir pameran mamin



Liga Spanyol
Marcos Alonso kabarnya sudah sepakat gabung Barcelona



Liga Inggris
Todd Boehly rampungkan akuisisi Chelsea senilai Rp78 triliun



Liga Prancis
Deschamps sebut Mbappe senangkan sepak bola Prancis

4. <https://www.antaraneews.com/berita/1770705/uu-cipta-kerja-bisa-batalkan-izin-usaha-jika-bermasalah-di-lingkungan>

TOP NEWS | TERKINI | TENTANG KAMI

ANTARA
KANTOR BERITA INDONESIA

Senin, 30 Mei 2022

HOME POLITIK HUKUM EKONOMI METRO SEPAKBOLA OLAHRAGA HUMANIORA LIFESTYLE HIBURAN NUSANTARA DUNIA ENGLISH

FOKUS INFOGRAFIK FOTO VIDEO TEKNO OTOMOTIF WARTA BUMI KARKHAS ANTI HOAX ANTARA INTERAKTIF RAMADHAN RILIS PERS INDEKS

UU Cipta Kerja bisa batalkan izin usaha jika bermasalah di lingkungan



REPUBLIC INDONESIA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan KEMENTERIAN PERENCANAAN

INDONESIA

UN SUMMIT ON BIODIVERSITY

Menteri LHK Siti Nurbaya mewakili Indonesia di acara Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan di sela-sela Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-75 yang digelar secara virtual

“UUCK mengintegrasikan kembali Izin Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha”

DATA PERKEMBANGAN COVID-19

DIRAWAT		
2.871		
TERKONFIRMASI	SEMBUH	MENINGGAL
6.054.633	+218	5.895.176
156.586		

DATA PER PROVINSI

Sumber: covid19.go.id last update: 30-05-2022 20:10 WIB

TERPOPULER

Berburu camilan Thailand di hari terakhir pameran mamin

TERKOMENTARI

Liga Spanyol
Marcos Alonso kabarnya sudah sepatat gabung Barcelona

Liga Inggris
Todd Boehly rampungkan akuisisi Chelsea senilai Rp78 triliun

Liga Prancis
Deschamps sebut Mbappe senangkan sepak bola Prancis

5. <https://www.antaraneews.com/berita/1774869/presiden-jokowi-izin-amdal-tetap-ada-di-uu-cipta-kerja>

TOP NEWS | TERKINI | TENTANG KAMI

ANTARA
KANTOR BERITA INDONESIA

Senin, 30 Mei 2022

HOME POLITIK HUKUM EKONOMI METRO SEPAKBOLA OLAHRAGA HUMANIORA LIFESTYLE HIBURAN NUSANTARA DUNIA ENGLISH

FOKUS INFOGRAFIK FOTO VIDEO TEKNO OTOMOTIF WARTA BUMI KARKHAS ANTI HOAX ANTARA INTERAKTIF RAMADHAN RILIS PERS INDEKS

Presiden Jokowi: Izin Amdal tetap ada di UU Cipta Kerja



Ilustrasi - Foto aerial pembangunan proyek kawasan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Data Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) Kabupaten Bekasi menyebutkan proyek Meikarta baru mendapatkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk lahan seluas 84,6 hektar sementara Amdal dan Izin Mendirikan Bangunan belum diperoleh. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt/pri.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan izin melalui pemenuhan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) tetap diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

DATA PERKEMBANGAN COVID-19

DIRAWAT		
2.871		
TERKONFIRMASI	SEMBUH	MENINGGAL
6.054.633 +218	5.895.176	156.586
DATA PER PROVINSI		
Sumber: covid19.go.id last update: 30-05-2022 20:10 WIB		

TERPOPULER TERKOMENTARI

- Berburu camilan Thailand di hari terakhir pameran mamin**
- Liga Spanyol**
Marcos Alonso kabarnya sudah sepakat gabung Barcelona
- Liga Inggris**
Todd Boehly rampungkan akuisisi Chelsea senilai Rp78 triliun
- Liga Prancis**
Deschamps sebut Mbappe senangkan sepak bola Prancis

6. <https://www.antaraneews.com/berita/1773653/pemerintah-pastikan-izin-amdal-tidak-dihapus-dalam-uu-cipta-kerja>

TOP NEWS | TERKINI | TENTANG KAMI

ANTARA
KANTOR BERITA INDONESIA

Senin, 30 Mei 2022

HOME POLITIK HUKUM EKONOMI METRO SEPAKBOLA OLARAGA HUMANIORA LIFESTYLE HIBURAN NUSANTARA DUNIA ENGLISH

FOKUS INFOGRAFIK FOTO VIDEO TEKNO OTOMOTIF WARTA BUMI KARKHAS ANTI HOAX ANTARA INTERAKTIF RAMADHAN RILIS PERS INDEKS

Pemerintah pastikan izin Amdal tidak dihapus dalam UU Cipta Kerja



Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Moegjarso. (ANTARA/Ade Irma Junida)

"Amdal tidak dihapus, dan tetap ada, akan tetapi prosesnya dibuat menjadi lebih sederhana, sehingga waktu

DATA PERKEMBANGAN COVID-19

DIRAWAT		
2.871		
TERKONFIRMASI	SEMBUH	MENINGGAL
6.054.633 +218	5.895.176	156.586
DATA PER PROVINSI		
Sumber: covid19.go.id last update: 30-05-2022 20:10 WIB		

TERPOPULER TERKOMENTARI

- Berburu camilan Thailand di hari terakhir pameran mamin**
- Liga Spanyol**
Marcos Alonso kabarnya sudah sepakat gabung Barcelona
- Liga Inggris**
Todd Boehly rampungkan akuisisi Chelsea senilai Rp78 triliun
- Liga Prancis**
Deschamps sebut Mbappe senang senak bola Prancis

7. <https://www.antaraneews.com/berita/1780497/klhk-uu-ciptaker-tingkatkan-pengelolaan-perhutanan-sosial>

TOP NEWS | TERKINI | TENTANG KAMI

ANTARA
KANTOR BERITA INDONESIA

Senin, 30 Mei 2022

HOME POLITIK HUKUM EKONOMI METRO SEPAKBOLA OLAHRAGA HUMANIORA LIFESTYLE HIBURAN NUSANTARA DUNIA ENGLISH

FOKUS INFOGRAFIK FOTO VIDEO TEKNO OTOMOTIF WARTA BUMI KARKHAS ANTI HOAX ANTARA INTERAKTIF RAMADHAN RILIS PERS INDEKS

KLHK: UU Ciptaker tingkatkan pengelolaan perhutanan sosial



acara Bincang Undang-Undang: Atasi Kesenjangan Multi Tafsir dengan tema Hutan Sosial Untuk Lapangan Kerja dan Keadilan yang digelar secara virtual, Senin (12/10)

Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto menyatakan, turut diaturnya perhutanan sosial dalam Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dinilai akan meningkatkan

DATA PERKEMBANGAN COVID-19

DIRAWAT
2.871

TERKONFIRMASI	SEMBUH	MENINGGAL
6.054.633 +218	5.895.176	156.586

DATA PER PROVINSI

Sumber: covid19.go.id last update: 30-05-2022 20:10 WIB

TERPOPULER TERKOMENTARI

- Berburu camilan Thailand di hari terakhir pameran mamin**
- Liga Spanyol**
Marcos Alonso kabarnya sudah sepakat gabung Barcelona
- Liga Inggris**
Todd Boehly rampungkan akuisisi Chelsea senilai Rp78 triliun
- Liga Prancis**
Deschamps sebut Mbappe senangkan

8. <https://www.antaraneews.com/berita/1899972/pengamat-ekonomi-uu-ciptaker-tidak-turunkan-standar-penilaian-amdal>

TOP NEWS | TERKINI | TENTANG KAMI

ANTARA
KANTOR BERITA INDONESIA

Senin, 30 Mei 2022

HOME POLITIK HUKUM EKONOMI METRO SEPAKBOLA OLAHRAGA HUMANIORA LIFESTYLE HIBURAN NUSANTARA DUNIA ENGLISH

FOKUS INFOGRAFIK FOTO VIDEO TEKNO OTOMOTIF WARTA BUMI KARKHAS ANTI HOAX ANTARA INTERAKTIF RAMADHAN RILIS PERS INDEKS

Pengamat ekonomi: UU Ciptaker tidak turunkan standar penilaian AMDAL



Ilustrasi: Kawasan Industri. ANTARA/HO-Biro Humas Kementerian Perindustrian/aa.

“UU Cipta Kerja ini untuk menyederhanakan tapi tidak menurunkan kualitas penilaian AMDAL. Dengan demikian,

DATA PERKEMBANGAN COVID-19

DIRAWAT		
2.871		
TERKONFIRMASI	SEMBUH	MENINGGAL
6.054.633 +218	5.895.176	156.586

DATA PER PROVINSI

Sumber: covid19.go.id last update: 30-05-2022 20:10 WIB

TERPOPULER TERKOMENTARI

- Berburu camilan Thailand** di hari terakhir pameran mamin
- Liga Spanyol**
Marcos Alonso kabarnya sudah sepakat gabung Barcelona
- Liga Inggris**
Todd Boehly rampungkan akuisisi Chelsea senilai Rp78 triliun
- Liga Prancis**
Deschamps sebut Mbappe senang sepak bola Prancis

9. <https://www.antaraneews.com/berita/1891588/menko-airlangga-pemerintah-jaga-pelestarian-lingkungan-di-uu-ciptaker>

TOP NEWS | TERKINI | TENTANG KAMI

ANTARA
KANTOR BERITA INDONESIA

Senin, 30 Mei 2022

HOME POLITIK HUKUM EKONOMI METRO SEPAKBOLA OLAHRAGA HUMANIORA LIFESTYLE HIBURAN NUSANTARA DUNIA ENGLISH

FOKUS INFOGRAFIK FOTO VIDEO TEKNO OTOMOTIF WARTA BUMI KARKHAS ANTI HOAX ANTARA INTERAKTIF RAMADHAN RILIS PERS INDEKS

Menko Airlangga: Pemerintah jaga pelestarian lingkungan di UU Ciptaker



Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. ANTARA/HO-Kemenkeo Perekonomian/pti.

"Bila dikelola secara klaster, kemudian kita dukung dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan diikuti dengan

DATA PERKEMBANGAN COVID-19

DIRAWAT		
2.871		
TERKONFIRMASI	SEMBUH	MENINGGAL
6.054.633 +218	5.895.176	156.586

DATA PER PROVINSI

Sumber: covid19.go.id last update: 30-05-2022 20:10 WIB

TERPOPULER

- Berburu camilan Thailand di hari terakhir pameran mamin
- Liga Spanyol: Marcos Alonso kabarnya sudah sepakat gabung Barcelona
- Liga Inggris: Todd Boehly rampungkan akuisisi Chelsea senilai Rp78 triliun
- Liga Prancis: Deschamps sebut Mbappe senang sepak bola Prancis

10. <https://www.antaraneews.com/berita/1912696/yasonna-sebut-uu-cipta-kerja-lahir-atasi-benang-kusut-perizinan>

TOP NEWS | TERKINI | TENTANG KAMI

ANTARA
KANTOR BERITA INDONESIA

Senin, 30 Mei 2022

HOME POLITIK HUKUM EKONOMI METRO SEPAKBOLA OLAHRAGA HUMANIORA LIFESTYLE HIBURAN NUSANTARA DUNIA ENGLISH

FOKUS INFOGRAFIK FOTO VIDEO TEKNO OTOMOTIF WARTA BUMI KARKHAS ANTI HOAX ANTARA INTERAKTIF RAMADHAN RILIS PERS INDEKS

Yasonna sebut UU Cipta Kerja lahir atasi benang kusut perizinan



Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam sambutannya pada kegiatan Focus Group Discussion Konsepsi dan Implementasi Sanksi dalam Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (22/12/2020). (ANTARA/Ho-Kementerian Hukum dan HAM)

Ini merupakan sesuatu yang sangat visioner. (UU Cipta

DATA PERKEMBANGAN COVID-19

DIRAWAT		
2.871		
TERKONFIRMASI	SEMBUH	MENINGGAL
6.054.633 +218	5.895.176	156.586
DATA PER PROVINSI		
Sumber: covid19.go.id last update: 30-05-2022 20:15 WIB		

TERPOPULER TERKOMENTARI

- Berburu camilan Thailand** di hari terakhir pameran mamin
- Liga Spanyol**
Marcos Alonso kabarnya sudah sepakat gabung Barcelona
- Liga Inggris**
Todd Boehly rampungkan akuisisi Chelsea senilai Rp78 triliun
- Liga Prancis**
Deschamps sebut Mbappe senangkan sepak bola Prancis

1. <https://www.mongabay.co.id/2020/02/14/horor-ruu-cipta-kerja-dari-izin-lingkungan-hilang-sampai-lemahkan-sanksi-hukum/>



TENTANG READERSBLOG HUTAN HUJAN FOTO PARA PENJAGA HUTAN

Untuk mencari, ketik dan teka

Sosial

Horor RUU Cipta Kerja, dari Izin Lingkungan Hilang sampai Lemahkan Sanksi Hukum

oleh Lusia Arumingtyas dan Sapariah Saturi [Jakarta] di 14 February 2020



- *Draf Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, sebagai upaya penyederhanaan aturan hukum (omnibus law) sudah masuk ke DPR pada 12 Februari 2020. Berbagai kalangan menyoroti isinya, karena banyak hal yang mengkhawatirkan dan bikin was-was seperti, bakal mempersulit ruang hidup rakyat, perparah kerusakan lingkungan, termasuk melemahkan*

berdasarkan topik

berdasarkan lokasi

- Batubara
- Deforestasi
- Energi
- Hutan
- Burung
- Dunia Satwa
- Ptitur
- Kabut Asao

2. <https://www.mongabay.co.id/2020/02/20/ruu-cipta-kerja-dinilai-ancam-masyarakat-dan-lingkungan-apa-kata-mereka/>



TENTANG READERSBLOG HUTAN HUJAN FOTO PARA PENJAGA HUTAN

Untuk mencari, ketik dan tekan

Sosial

RUU Cipta Kerja Dinilai Ancam Masyarakat dan Lingkungan, Apa Kata Mereka?

oleh Lusia Arumingtyas [Jakarta] di 20 February 2020



- *Muhammad Arman, Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan, dalam kaitan pengakuan hak masyarakat, substansi RUU ini sangat berbahaya, terutama masyarakat adat. Selama ini, upaya pengakuan dan pemberian akses kelola masyarakat saja masih tersendat-sendat.*

berdasarkan topik

berdasarkan lokasi

- Batubara
- Deforestasi
- Energi
- Burung
- Dunia Satwa
- Fitur

3. <https://www.mongabay.co.id/2020/03/21/nasib-suram-hutan-negeri-ada-omnibus-law-makin-buram/>



TENTANG READERSBLOG HUTAN HUJAN FOTO PARA PENJAGA HUTAN

Untuk mencari, ketik dan teka

Hutan

Nasib Suram Hutan Negeri, Ada Omnibus Law, Makin Buram

oleh Lusia Arumingtyas [Jakarta] di 21 March 2020



- Hari Hutan Internasional jatuh tiap 21 Maret. Tahun 2020, bisa jadi tahun kurang baik bagi hutan Indonesia, yang sudah merana selama ini. Februari lalu, Pemerintah Indonesia menyerahkan draf RUU Cipta Kerja, yang berisi penyederhanaan berbagai aturan (omnibus law), termasuk UU Kehutanan dan UU Perlindungan dan Pengelolaan

berdasarkan topik

berdasarkan lokasi

- Batubara
- Deforestasi
- Energi
- Hutan
- Kelapa Sawit

- Burung
- Dunia Satwa
- Fitur
- Kabut Asap
- Konservasi

4. <https://www.mongabay.co.id/2020/03/18/bisa-celakakan-lingkungan-banyak-kalangan-protes-ruu-omnibus-law/>



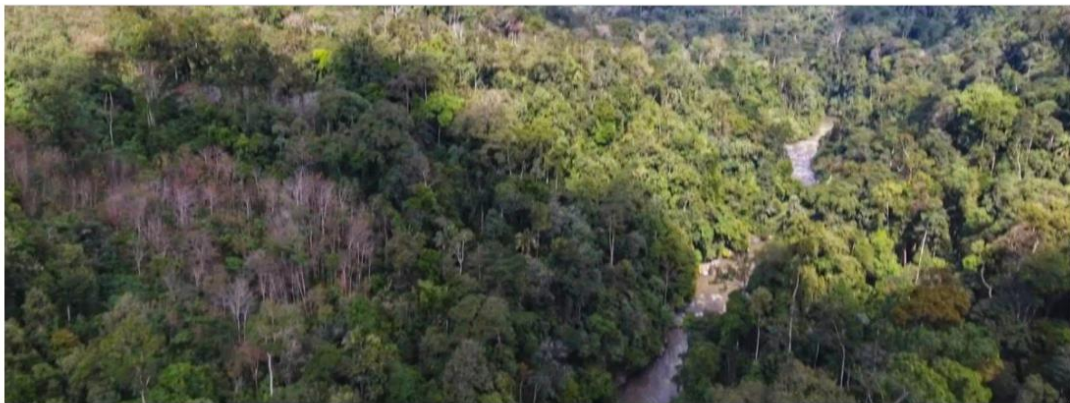
TENTANG READERSBLOG HUTAN HUJAN FOTO PARA PENJAGA HUTAN

Untuk mencari, ketik dan tekan

Hutan

Bisa Celakakan Lingkungan, Banyak Kalangan Protes RUU Omnibus Law

oleh Indra Nugraha dan Ayat S Karokaro di 18 March 2020



- Berbagai kritik dan protes banyak kalangan terhadap Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Organisasi lingkungan menilai, RUU ini berpotensi mencelakakan lingkungan hidup. Beberapa pasal dalam UU guna menjamin keselamatan lingkungan, justru dihapus dengan dalih mempermudah investasi. Suara protes pun datang dari daerah seperti Sumatera Utara.
- Zandi Sukardi, Kepala Departemen Adiklatif Eksternal di Mahkamah Konstitusi menilai, ada beberapa pasal di rancangan tersebut

berdasarkan topik

berdasarkan lokasi

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Batubara• Deforestasi• Energi• Hutan• Kelapa Sawit | <ul style="list-style-type: none">• Burung• Dunia Satwa• Fitur• Kabut Asap• Konservasi |
|--|--|

5. <https://www.mongabay.co.id/2020/10/05/ruu-cipta-kerja-ketok-palu-lonceng-bahaya-bagi-lingkungan-hidup/>



TENTANG READERSBLOG HUTAN HUJAN FOTO PARA PENJAGA HUTAN

Untuk mencari, ketik dan tekan

Hutan

RUU Cipta Kerja Ketok Palu, Lonceng Bahaya bagi Lingkungan Hidup?

oleh Indra Nugraha dan Lusya Arumingtyas [Jakarta] di 5 October 2020



- Kritik datang terus menerus dari berbagai kalangan, namun pemerintah dan DPR terus membahas Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Bahkan, Senin (5/10/20), rapat paripurna DPR ketok palu, mengesahkan RUU ini jadi Undang-undang. Sebelumnya, DPR mengagendakan pengesahan RUU Ciptaker menjadi UU, pada Kamis (8/10/20) tetapi dipercepat.
- RUU Omnibus Law memuat 11 klaster antara lain, penyederhanaan perizinan lahan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dan dukungan riset dan inovasi. Kemudian administrasi pemerintahan, penanganan sengketa, penanganan lahan, kemudahan akses pemerintah, dan

berdasarkan topik

berdasarkan lokasi

- Batubara
- Deforestasi
- Energi
- Hutan
- Kelapa Sawit

- Burung
- Dunia Satwa
- Fitur
- Kabut Asap
- Konservasi

6. <https://www.mongabay.co.id/2020/10/07/uu-cipta-kerja-melegalkan-deforestasi-dan-degradasi-hutan/>



TENTANG READERSBLOG HUTAN HUJAN FOTO PARA PENJAGA HUTAN

Untuk mencari, ketik dan tekan

Opini

UU Cipta Kerja Melegalkan Deforestasi dan Degradasi Hutan

oleh Zenwen Pador * di 7 October 2020



Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRRI, Supratman Andi Agtas dalam laporannya pada Rapat Paripurna (5 Oktober 2020) menyetujui RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Salah satunya dia menyampaikan materi pengaturan baru terkait perkebunan masyarakat di kawasan hutan.

Supratman menyampaikan bahwa perihal keterlanjuran perkebunan masyarakat di kawasan hutan masyarakat akan dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas lahan dalam kawasan hutan. Menurutnya lagi lahan masyarakat yang berada di kawasan

berdasarkan topik

berdasarkan lokasi

- Batubara
- Deforestasi
- Energi
- Hutan
- Kelapa Sawit
- Burung
- Dunia Satwa
- Fitur
- Kabut Asap
- Konservasi

7. <https://www.mongabay.co.id/2020/10/17/kesimpangsiuran-informasi-di-balik-undang-undang-cipta-kerja/>



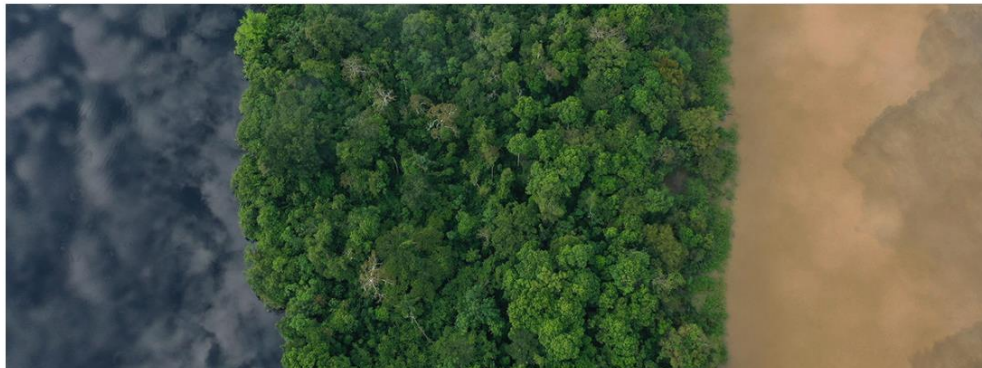
TENTANG READERSBLOG HUTAN HUJAN FOTO PARA PENJAGA HUTAN

Untuk mencari, ketik dan tekan

Opini

Kesimpangsiuran Informasi di Balik Undang-Undang Cipta Kerja

oleh Delly Ferdian * di 17 October 2020



Tepat pada 5 Oktober 2020, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Sontak, pengesahan tersebut menuai reaksi yang beragam dari publik. Ada yang merasa bahwa UU ini merupakan kabar baik dan gembira (bagi para investor, saudagar, cukong, pemilik modal dan banyak macam jenis kapitalis lainnya), tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa pengesahan UU ini adalah kabar duka bagi bangsa Indonesia.

Bagaimana tidak, di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19,

berdasarkan topik

berdasarkan lokasi

- Batubara
- Deforestasi
- Energi
- Hutan
- Kelapa Sawit
- Burung
- Dunia Satwa
- Fitur
- Kabut Asap
- Konservasi

8. <https://www.mongabay.co.id/2020/11/16/perlukan-rancangan-peraturan-pemerintah-dibuat-sebagai-turunan-uu-cipta-kerja/>



TENTANG READERSBLOG HUTAN HUJAN FOTO PARA PENJAGA HUTAN

Untuk mencari, ketik dan tekan

Laut

Perlukan Rancangan Peraturan Pemerintah Dibuat sebagai Turunan UU Cipta Kerja?

oleh M Ambari [Jakarta] di 16 November 2020



- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah disahkan dan berlaku secara umum. Agar UU tersebut bisa bekerja maksimal pada sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang penusunannya dilakukan sekarang
- Dalam melaksanakan penyusunan RPP, KKP dibantu oleh perguruan tinggi yang memiliki kompetensi pada sektor kelautan dan perikanan. Pembahasan tersebut dilakukan dengan mengacu pada kebutuhan setiap subsektor yang ada di bawah kelautan dan perikanan
- Di antara subsektor itu adalah perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut. Kedua subsektor tersebut sedang

berdasarkan topik

- Batubara
- Deforestasi
- Energi
- Hutan

berdasarkan lokasi

- Burung
- Dunia Satwa
- Fitur
- Kabut Asap

9. <https://www.mongabay.co.id/2020/11/18/uu-cipta-kerja-revisi-uu-minerba-dan-terbukanya-gerbang-krisis-iklim/>



TENTANG READERSBLOG HUTAN HUJAN FOTO PARA PENJAGA HUTAN

Untuk mencari, ketik dan tekan

Opini

UU Cipta Kerja, Revisi UU Minerba, dan Terbukanya Gerbang Krisis Iklim

oleh Irsyad Madjid * di 18 November 2020



Meskipun sempat beredar beberapa versi, substansi dari UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 khususnya pada persoalan lingkungan dan sektor energi, relatif tidak berubah. Nampaknya, ini menjadi suatu pertanda bahwa kesepakatan terkait urusan lingkungan sudah tidak perlu diperdebatkan lagi di lingkaran DPR dan Pemerintah Pusat.

Hal ini pun membuat aktivis lingkungan punya agenda yang cukup padat di tahun 2020. Bukan sesuatu yang mengherankan, sebab pemerintah mengajukan dua undang-undang sekaligus yang dianggap melemahkan *safeguard* lingkungan hidup.

berdasarkan topik

berdasarkan lokasi

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Batubara• Deforestasi• Energi• Hutan• Kelapa Sawit• Laut | <ul style="list-style-type: none">• Burung• Dunia Satwa• Fitur• Kabut Asap• Konservasi• Konservasi |
|---|---|

10. <https://www.mongabay.co.id/2020/12/07/kedaulatan-pangan-makin-suram-di-era-uu-cipta-kerja/>

Sosial

Kedaulatan Pangan Makin Suram di Era UU Cipta Kerja

oleh Indra Nugraha [Bandung] di 7 December 2020



- Berbagai kalangan menilai, kedaulatan pangan Indonesia malah terancam dengan ada UU Cipta Kerja. Beberapa organisasi tani, seperti Serikat Tani Indonesia, Bina Dewa dan lain-lain, bersama koalisi masyarakat sipil, menggugat UU ini ke Mahkamah Konstitusi, awal November lalu.
- Soal impor pangan, dalam UU Pangan, sebelumnya, ada klausul/jelas mengenai pembatasan impor pangan. Bahwa, impor pangan bisa kalau produksi dalam negeri tak mencukupi kebutuhan masyarakat. Ketentuan ini hilang dalam

berdasarkan topik

berdasarkan lokasi

- Batubara
- Deforestasi
- Energi
- Hutan
- Kelapa Sawit

- Burung
- Dunia Satwa
- Pitur
- Kabut Asap
- Konservasi

Lampiran 5. Curriculum Vitae

About Me

ADITYA ARIANTO DENIS



Pendidikan Formal :
Mahasiswa Ilmu Komunikasi
Universitas Pembangunan Jaya
Broadcasting Journalism

Tempat, Tanggal Lahir:
Jakarta, 18 Agustus 2000

Agama:
Islam

Gender:
Pria

Status:
Lajang

Alamat:
JL Alpukat IV Blok E 18 No 29,
RT 04/RW 18. Tangerang
Selatan, Benda Baru Pamulang

Kegiatan yang sedang Dilakukan

- Marketing Communication - Core Universitas Pembangunan Jaya 2021 - Sekarang
- Admin Instagram @Oks_Shop 2020 - Sekarang
- Mengelola Akun Youtube ADeniss 2017 - Sekarang

Keterampilan

- Fotografi
- Videografi
- Microsoft Office
- Adobe Premier Pro (Dasar)
- Sony Vegas Pro
- Adobe Photoshop

Prestasi

- Nominator Karya Video Komunikasi Interpersonal Terbaik - Kom Awards 2020
- Presentasi Terbaik Metodologi Penelitian 2020
- Mencapai 200 Ribu Subscriber di Youtube Pada Akun ADeniss
- Juara 2 Online Tournament Free Fire Indonesia Pada Acara Alcatrazz 2020

Pengalaman

- Anggota UPJ Live 2018 - 2019
- Magang di Cremony Love Cathering Organizer Sebagai Admin Media Sosial dan Content Writer, 2020
- Magang di Marketing Universitas Pembangunan Jaya Sebagai Sosial Media Team Pada 15 Juni 2020 - 15 September 2020

 Aditya.Ariantodenis@student.upj.ac.id  +62 877-8827-8217  @adeniss

Lampiran 6. Sertifikat LDK



SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

ADITYA ARIANTO DENIS

SEBAGAI

PESERTA

COMPLETE

(LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN DAN MAKRAB)

22 - 23 JANUARI 2019

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

KEPALA PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI


RENI DYANASARI. S.I.KOM, M.SI



DEKAN FAKULTAS HUMANIORA DAN BISNIS

DR. DION DEWA BARATA, SE, MSM

Lampiran 7. Formulir Pengajuan Skripsi




	FORMULIR PENGAJUAN SKRIPSI/TA	SPT-I/03/SOP-28/F-01
		No. Revisi

Nama Mahasiswa : Aditya Arianto Denis
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2018041037
 Judul Skripsi/TA yang diajukan : Pembingkatan Berita Isu Kebijakan Lingkungan Dalam
 (disusun dalam kalimat singkat, padat, jelas dan menarik minat pembaca)
 Undang Undang Cipta Kerja (Komparasi Framing Berita Isu Kebijakan Pembangunan dan pada Lingkungan antara, Mongabay.co.id, dan Antaranews.com)


Telah memenuhi syarat pengajuan Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)

No	Syarat	Ya	Tidak
1	Jumlah sks lulus (sesuai ketentuan Prodi)	V	
2	Mata kuliah prasyarat (sesuai ketentuan Prodi)	V	
3	IPK minimal 2,00	V	
4	Tidak sedang terkena sanksi akademik/sanksi lainnya	V	
5	Poin JSDP (sesuai ketentuan Prodi)	V	
6	Mengumpulkan Proposal Skripsi (sesuai ketentuan Prodi)	V	
7	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	V	

Tangerang Selatan, 21 April 2022

Mengajukan,	Menyetujui,	Mengetahui,
		
Mahasiswa: Aditya Arianto Denis	Dosen PA: Yosaphat Danis Murtiharso, M.Sn	Kaprodi: Naurissa Biasini, M.I.Kom

Lampiran 8. Formulir Persetujuan Penulisan Skripsi

 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI/TA	SPT-1/03/SOP-28/F-02
		No. Selamur




Nama Mahasiswa : Aditya Arianto Denis
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2018041037
 Judul Skripsi/TA yang diajukan : Pembingkatan Berita Isu Kebijakan Lingkungan Dalam Undang Undang Cipta Kerja (Komparasi Framing Berita Isu Kebijakan Pembangunan dan Dampaknya pada Lingkungan antara Mongabay.co.id, dan Antaranews.com)

Telah disetujui untuk menulis Skripsi/TA.


Dosen Pembimbing Skripsi/TA yang ditugaskan Prodi adalah:

No	Nama	NIDN	JAD
1	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si	0030107504	Lektor

Tangerang Selatan, 18 April 2022

Menugaskan,	Menyetujui,	Menerima,
		
Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom	Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si

Lampiran 9. Formulir Pengajuan Sidang Skripsi





	FORMULIR PENGAJUAN SIDANG SKRIPSI/TA	SPT-I/04/SOP-06/F-01
		No. Revisi

Nama Mahasiswa : Aditya Arianto Denis
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2018041037
 Judul Skripsi/TA : Pembingkai Berita Isu Kebijakan Lingkungan Dalam Undang Undang Cipta Kerja (Komparasi Framing Berita Isu Kebijakan Pembangunan dan Dampaknya pada Lingkungan antara Mongabay.co.id, dan Antaraneews.com)
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.
 : 2.
 Dosen Penguji : 1. JAD :
 : 2. JAD :
 : 3. JAD :
 Jadwal Sidang : Tempat : Hari/Tanggal :

Telah memenuhi syarat Sidang Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)

No	Syarat	Ya	Tidak
1	IPK minimal 2.00	V	
2	Tidak ada nilai D untuk mata kuliah mayor/inti Prodi	V	
3	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	V	
4	Lulus minimal 1 mata kuliah KOTA untuk tiap rumpun	V	
5	SPT-I/03/SOP-28/F-03 Formulir Pembimbingan Skripsi (minimal 8 x)	V	
6	Poin JSDP (minimal 75% persen dari syarat kelulusan)	V	
7	Mengumpulkan dokumen Skripsi/TA (sesuai ketentuan Prodi)	V	

Tangerang Selatan, 31 Mei 2022

Mengajukan	Mengetahui	Memeriksa	Menyetujui
 Aditya Arianto Denis Mahasiswa	 Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si Dosen Pembimbing	 Naurissa Biasini, S.Si, M.I.Kom Koordinator Skripsi/TA	 Naurissa Biasini, S.Si, M.I.Kom Kaprodi

Lampiran 10. Formulir Revisi Skripsi (Dosen Penguji 1)

 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR REVISI SKRIPSI / TA	SPT-I/04/SOP-06/F-05
		No. Rekaman

Nama Mahasiswa : Aditya Arianto Denis
Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2018041037
Judul Skripsi/TA : Pembingkatan Berita Isu Kebijakan Lingkungan Dalam Undang Undang Cipta Kerja (Komparasi Framing Berita Isu Kebijakan Pembangunan dan Dampaknya pada Lingkungan antara Mongabay.co.id, dan Antaranews.com)
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si
Dosen Penguji : 1. Dra. Clara Evi C. Citraningtyas, M.A., Ph.D
: 2. Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm
Jadwal Sidang : Tempat : Kelas B 604 UPJ Hari/Tanggal: Selasa, 7 Juni 2022

Revisi yang dilakukan :

1. Menambahkan judul Skripsi menjadi lebih lengkap terkait (Undang Undang) Cipta Kerja
2. Mengubah tulisan "libraries" menjadi "references" pada bagian abstrak bahasa inggris
3. Memberikan penjelasan pada latar belakang masalah terkait pembertiaan Undang Undang Cipta Kerja
4. Merevisi dan memfokuskan penulisan menjadi Isu Kebijakan lingkungan
5. Memperbarui pada metode pengujian data, mengenai tahapan analisis di dalam metode Dependability
6. Memrapihkan penulisan, terkait typo yang ada di bab 4 dan bab 5

Tangerang Selatan, 22 Juni 2022



Dra. Clara Evi C. Citraningtyas, M.A., Ph.D

Lampiran 11. Formulir Revisi Skripsi (Dosen Penguji 2)

 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR REVISI SKRIPSI / TA	SPT-I/04/SOP-06/F-05
		No. Rekaman

Nama Mahasiswa : Aditya Arianto Denis
Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2018041037
Judul Skripsi/TA : Pembingkaian Berita Isu Kebijakan Lingkungan Dalam Undang Undang Cipta Kerja (Komparasi Framing Berita Isu Kebijakan Pembangunan dan Dampaknya pada Lingkungan antara Mongabay.co.id, dan Antaranews.com)
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si
Dosen Penguji : 1. Dra. Clara Evi C. Citraningtyas, M.A., Ph.D
: 2. Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm
Jadwal Sidang : Tempat : Kelas B 604 UPJ Hari/Tanggal: Selasa, 7 Juni 2022

Revisi yang dilakukan :

1. Menambahkan judul Skripsi menjadi lebih lengkap terkait (Undang Undang) Cipta Kerja
2. Mengubah tulisan "libraries" menjadi "references" pada bagian abstrak bahasa inggris
3. Memberikan penjelasan pada latar belakang masalah terkait pembertiaan Undang Undang Cipta Kerja
4. Merevisi dan memfokuskan penulisan menjadi Isu Kebijakan lingkungan
5. Memperbarui pada metode pengujian data, mengenai tahapan analisis di dalam metode Dependability
6. Memrapihkan penulisan, terkait typo yang ada di bab 4 dan bab 5

Tangerang Selatan, 22 Juni 2022



Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm